

PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU DI NUSA TENGGARA TIMUR

Lokakarya Internasional
Kupang, April 5-7th 2006



UNDANA, Kupang, 2007

Sitasi:

Djoeroemana, S., Myers, B., Russell-Smith, J., Blyth, M. dan Salean, I.E.T. (eds) 2007. Pembangunan Pedesaan Terpadu Di Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia, 5-7 April 2006, Jilid Pendukung. UNDANA 81 hlm

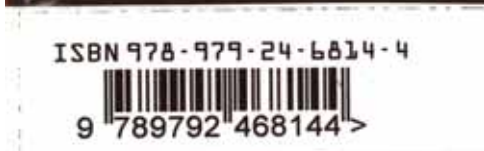
Lokakarya Internasional (2006 : Kupang)

Pembangunan pedesaan terpadu di Nusa Tenggara Timur : lokakarya internasional, Kupang, 5-7 April 2006 / Siliwoloe Djoeroemana ... [et al.]. -- Kupang : Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2007. ... hlm. ; ... cm.

Bibliografi : hlm. ...
ISBN 978-979-24-6814-4

1. Pembangunan ekonomi -- Nusa Tenggara Timur. I. Judul. II. Siliwoloe Djoeroemana.

338.959 855



Kata Pengantar

Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc. Ph.D
(Rektor Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT – Indonesia)

Saya menyambut baik permintaan editor untuk menyampaikan kata pengantar pada penerbitan Prosiding Pembangunan Pedesaan Terpadu di Nusa Tenggara Timur, yang dikompilasi dari makalah- makalah dalam Lokakarya Internasional di Kupang, 5 – 7 April 2006.

Pembangunan masyarakat desa merupakan isu yang sangat penting dan strategis dalam konteks regional mengingat proporsi terbesar penduduk Indonesia, khususnya penduduk Nusa Tenggara Timur bermukim di desa dengan tingkat penghasilan yang rendah dan kualitas hidup yang masih memprihatinkan. Secara jujur haruslah diakui bahwa sudah banyak program pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat, namun belum mampu mengatasi persoalan-persoalan pembangunan di pedesaan secara tepat.

Salah satu alasan penting terhadap kegagalan tersebut adalah kurangnya atau bahkan ketiadaan kesesuaian antara problem yang dihadapi masyarakat pedesaan dengan program yang diterapkan. Di samping itu, kurangnya pendampingan juga merupakan alasan penting bagi ketidakberdayaan masyarakat pedesaan untuk memahami strategi program yang melemahkan minat, motivasi, dan tanggung-jawab masyarakat terhadap program-program yang dikembangkan. Kendala lain adalah jiwa ego-sektoral yang seringkali mengental dan mewarnai program-program pembangunan pedesaan, khususnya pada proyek-proyek pemerintah, menimbulkan konflik kepentingan yang pada ujungnya menurunkan keterpaduan dan efektifitas program pembangunan.

Terkait dengan isu-isu strategis di atas, saya menyambut gembira prosiding seminar internasional ini yang telah mengidentifikasi kendala-kendala utama, dan merumuskan strategi-strategi kunci bagi peningkatan program pembangunan pedesaan. Semoga rumusan-rumusan tersebut dapat menjadi acuan bagi para peneliti dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, serta para kontributor pembangunan pedesaan termasuk masyarakat dan LSM. Bagi Undana, hasil lokakarya dan prosiding internasional ini memberikan salah satu acuan dan dukungan moral bagi rencana yang sangat mendesak bagi pembukaan Program Master di Bidang Pembangunan Pedesaan Tropis (Master in Tropical Rural Development) bekerjasama dengan Charles Darwin University, University of the Sunshine Coast, dan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Terima kasih.

BLANK PAGE

Prakata

Lokakarya Pembangunan Desa Terpadu di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diselenggarakan di Kupang pada bulan April 2006. Lokakarya tersebut telah mempertemukan para tenaga ahli dari daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Makalah-makalah dalam lokakarya tersebut menyajikan tinjauan tentang kegiatan pembangunan pedesaan di NTT pada masa lalu dan masa sekarang. Yang terpenting dalam hal ini bahwa dalam makalah yang disajikan menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan pedesaan terpadu yang terkait erat dengan peneliti, badan pemerintah dan masyarakat yang efektif demi keberhasilan yang berkesinambungan. Dari lokakarya tersebut telah dihasilkan kerangka kerja untuk keterpaduan penelitian dan kegiatan pembangunan yang efektif di NTT. Makalah-makalah yang disajikan dalam lokakarya memberikan informasi pembangunan untuk penelitian dan kegiatan pembangunan kapasitas untuk masa depan di NTT.

Laporan lengkap hasil lokakarya diterbitkan sebagai berikut:

Djoeroemana, S., Myers, B., Russell-Smith, J., Blyth, M. and Salean, I.E.T. (eds) 2007. Integrated rural development in East Nusa Tenggara, Indonesia. Proceedings of a workshop to identify sustainable rural Livelihoods, held in Kupang, Indonesia, 5–7 April 2006. ACIAR Proceedings No.126, 196p.

ISBN 1 86320 526 8 (print)

ISBN 1 86320 527 6 (on line)

Termasuk dalam jilid ini beberapa makalah lokakarya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Disamping itu pula tercantum tinjauan lokakarya dan sambutan pembukaan yang disajikan dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, dan daftar peserta loka karya.

Secara luas diketahui adanya kemiripan lingkungan, dan permasalahan utama dalam pengelolaan lahan di Indonesia Timur, Timor Timur dan Australia Utara. Pemandangan yang didominasi oleh sabana (padang rumput) merupakan tantangan utama dalam pengelolaan lahan dan sumber alam, kepemilikan lahan dan mata pencaharian penduduk pedesaan yang berkesinambungan.

Kerjasama internasional telah berkembang pada permasalahan pembangunan pedesaan di daerah selama 15 tahun terakhir. Ikatan formal telah disepakati antara badan-badan di Australia Utara dan Indonesia Timur pada pertengahan tahun 1990an. Ikatan tersebut dikembangkan dan diperluas melalui dua proyek yang didanai oleh ACIAR: tinjauan lokakarya, pengelolaan kebakaran dan pertanian yang berkesinambungan di Indonesia Timur dan Australia Utara, yang telah diselenggarakan di Darwin 13-15 April 1999 (Russell-Smith *et al* 2000) dan proyek pelaksanaan penelitian besar pada pengelolaan kebakaran pada lahan sabana dengan wilayah lapangan di Sumba Timur dan Ngada, Flores (<http://fireindon.cdu.edu.au>). Saat ini, pengelolaan kapasitas lahan di Indonesia timur (NTT) telah dikembangkan lebih lanjut melalui proyek AusAID Program Kaitan Sektor Publik (*an AusAID Public Sector Linkage Program project*) antara Charles Darwin University dengan BAPPEDA NTT (<http://IndonNRMpslp.ehs.cdu.edu.au>).

BLANK PAGE

UCAPAN TERIMAH KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi berikut yang mensponsori dan mendukung Lokakarya ini: Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Charles Darwin University, the Cooperative Research Centre for Tropical Savannas Management, BAPPEDA NTT, AusAID's, International Seminar Support Scheme, the Crawford Fund dan University of the Sunshine Coast. Kami sangat menghargai dukungan dari pemerintah Northern Territory dan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih tertuju pula kepada saudara Yudhistira Yewangoe (BAPPEDA NTT) dan timnya yang telah menyediakan dukungan logistik dan tempat Lokakarya di Kupang. Juga kepada saudara Umi Rasmi dari Charles Darwin University yang telah melayani interpretasi yang cemerlang dan layanan terjemahan dalam mempersiapkan makalah-makalah, presentasi-presentasi dan laporan lokakarya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana yang menolong dengan menerbit dan mencetak laporan lokakarya ini. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada peserta Lokakarya yang telah memberikan sumbangan pikiran konstruktif dan budi baik yang berkelanjutan dari para mitra regional.

Daftar Singkatan:

ACIAR: Australian Centre for International Agricultural Research

AD: Anggaran Dasar

ART: Anggaran Rumah Tangga

APBDes: Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa

APEC: Asia Pacific Economic Cooperation

AusAID: Australian Agency for International Development

Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPD: Badan Perencana Desa

BPLM: Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat

BRI: Bank Rakyat Indonesia

CDU: Charles Darwin University, Northern Territory, Australia

DAS: Daerah Aliran Sungai

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Forpeldas: Forum Peduli Lingkungan Daerah Aliran Sungai

GIS: Geographic Information System

IDT: Inpres Desa Tertinggal

IRD: Integrated Rural Development (Pembangunan Pedesaan Terpadu)

ISSS: International Seminar Support Scheme (AusAID)

LKMD: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

KUD: Koperasi Unit Pedesaan

Musrenbangdes: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pedesaan

Musrenbangcam: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Musrenbangda: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

NT: Northern Territory of Australia

NTT: Nusa Tenggara Timur

P4K Proyek Peningkatan Pendapatan Petani – Nelayan Kecil
PEM: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
PEMDA: Pemerintah Daerah (Regional Government)
Perdes: Peraturan Pedesaan
Perda: Peraturan Daerah
PICMA: Participatory Integrated Catchment Approach (Pendekatan Partisipasi Pengelolaan DAS Terpadu)
PSDA-BM: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat
PSLP: Public Sector Linkage Program (AusAID)
Renstra: Perencanaan Strategis
RT: Rukun Tetangga
RTL: Rencana Tindak Lanjut
SDM K: Studio Driya Media Kupang
TLM: Tanaoba Lais Manekat
TTS: Timor Tengah Selatan
TTU: Timor Tengah Utara
UBSP: Usaha Bersama Simpan Pinjam
UKM: Usaha Kecil Menengah
USC: University of the Sunshine Coast, Queensland, Australia
UU: Undang-undang
YMTM: Yayasan Mitra Tani Mandiri

DAFTAR ISI

Sambutan – Gubernur Nusa Tenggara Timur	11
Sambutan – Chief Minister Northern Territory	16
Tinjauan umum terhadap kesempatan, kendala dan pilihan untuk memperbaiki mata pencaharian Michael Blyth, Siliwoloe Djoeroemana, Jeremy Russell-Smith, Bronwyn Myers	20
Pembangunan pedesaan terintegrasi berbasis agribisnis di NTT Bungaran Saragih	38
Tinjauan umum terhadap aspek-aspek lingkungan hidup, sosial budaya, ekonomi dan politik pembangunan pedesaan NTT Siliwoloe Djoeroemana, E.Th. Salean dan W. Nope	43
Pengalaman pendampingan masyarakat DAS Aemau-DAS Aesesa, Ngada, Flores Josef Maan dan Paskalis Nai	50
Pengelolaan kebakaran, kerjasama masyarakat dan pembangunan desa di Nusa Tenggara Timur: Pelajaran dari proyek yang didanai ACIAR di Sumba Timur dan Ngada J. Russell-Smith, S Djoeroemana, GJE Hill, J Maan, B Myers, P Pandanga	59
Pinjaman mikro untuk pembangunan masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur: Masalah dan solusi menurut pandangan Organisasi Non-Pemerintah S.M. Rozali	67
Daftar Peserta	76

BLANK PAGE

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SAMBUTAN
PADA ACARA LOKAKARYA INTERNASIONAL
“PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU DI NUSA TENGGARA TIMUR”
KERJASAMA PEMERINTAH NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA DAN
PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 05-07 APRIL 2006

Piet Alexander Tallo, SH
Gubernur Nusa Tenggara Timur

Yang terhormat :

- Chief Minister Northern Territory
- Ketua DPRD Propinsi NTT
- Anggota Musyarawah Pimpinan Daerah
- Pimpinan dinas / badan / biro/kantor atau yang mewakili
- Pejabat sipil dan militer
- Para pembicara dan peserta lokakarya

Singkatnya hadirin sekalian yang saya kasihi,
Pertama-pertama dengan keiklasan dan kesadaran yang mendalam saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang maha pengasih, karena atas cinta kasih dan perkenannya kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir dan mengikuti peristiwa penting dan strategis ini.

Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bentuk dan bukti cinta Tuhan kepada kita semua, dimana kita berkesempatan untuk saling mengisi dan memberi dalam suasana kekeluargaan. Perlu kita hayati bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam peristiwa kemanusiaan, tetapi sudah merupakan bagian hubungan holistik dari rencana Allah terhadap manusia, rencana manusia terhadap sesama manusia dan rencana manusia terhadap lingkungannya yang kesemuanya diarahkan bagi peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan manusia selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Australia, yang sampai dengan hari ini masih menyempatkan diri untuk terus memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia pada umumnya dan secara khusus kepada pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1970an sudah ada perhatian dan kerjasama pembangunan pedesaan melalui proyek-proyek secara sektoral, bahkan selama dua tahun terakhir ini telah terjalin kerjasama antara Australia dan Indonesia melalui program menejemen api di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ngada yang berhasil dengan baik.

Selama pelaksanaan proyek ini banyak aspek yang sudah diteliti, terutama hubungan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan yang berimplikasi pada kebutuhan kerjasama yang lebih intens antara masyarakat lokal, pemerintah local, LSM, dan

perguruan tinggi setempat dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini memberi peluang bagi pembangunan pedesaan terpadu yang mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Kondisi alam Nusa Tenggara Timur pada umumnya kering dengan musim hujan yang kurang, sudah tentu memiliki karakteristik tersendiri dan karena itu menjadi sangat penting adanya upaya-upaya peningkatan kemampuan manajemen lahan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di NTT serta meningkatkan kemampuan penggunaan lahan yang ramah lingkungan.

Hadirin Yang Saya Hormati

Pedesaan merupakan "*hinterland*" perkotaan dengan aktivitas utamanya adalah pertanian, karena itu sektor ini masih dominan, sekaligus sebagai sektor basis bagi pembangunan daerah NTT.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, distribusi aset, peralatan, bibit unggul, pola tanam dan berternak merupakan faktor-faktor yang perlu digerakan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dengan dukungan perbaikan irigasi, skim kredit bagi petani, peningkatan ketrampilan petani yang pada waktunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Suatu realita kehidupan pertanian pedesaan yang masih mengelola pertanian sebatas pada pertanian subsisten, mengakibatkan daya tawar pasar dari produk sangat rendah, dan untuk menjawab permasalahan ini dibutuhkan suatu pendekatan pembangunan pedesaan terpadu yang berkelanjutan.

Harapan dari Lokakarya

Kausalistik antara kearifan lokal dan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik melalui kegiatan yang bersifat holistik. Karena itu melalui lokakarya internasional ini saya berharap kita dapat membangun suatu komitmen strategis dan saling mengikat dengan "*komunitas internasional*" dalam rangka pembangunan pedesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan kemitraan antara pemerintah, LSM, lembaga donor, dan lembaga pendidikan untuk bersama-sama menaruh perhatian pada pembangunan pedesaan yang berkelanjutan amat diperlukan.

Penjabaran "pertumbuhan melalui pemerataan" sebagai strategi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur adalah mensyaratkan agar aspek pemerataan sungguh-sungguh mendapat perhatian sehingga tidak diartikan sempit tentang makna "*sharing of resources*" tetapi dalam pengertian yang lebih luas dan dinamis, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat melalui tiga pilar yaitu SDM, ekonomi dan hukum yang digerakkan oleh tiga faktor dinamis yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sumber kemajuan, transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pendayagunaan modal sosial untuk menjamin partisipasi masyarakat yang optimal.

Kearifan lokal yang saya maksudkan adalah membangun dengan apa yang ada sebagai salah satu perspektif millenium development goals yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan kemitraan global karena itu siapapun dia umat manusia yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan kita harus dapat bekerjasama saling membantu dan menguatkan untuk membangun kesejahteraan.

Tentu lokakarya internasional ini telah mengagendakan isu-isu penting yang dapat didiskusikan dan disepakati serta direkomendasikan untuk diimplementasi lebih lanjut. Saya berharap para peserta lokakarya ini mendiskusikan isu-isu itu dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur, LSM-LSM, Perguruan Tinggi dan Komunitas Internasional.

Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada penyandang dana dari Australia untuk mebiayai lokakarya ini. Mereka adalah Northern Territory Government, Charles Darwin University, ACIAR, AusAID, Tropical Savannas Cooperative Research Centre University of Sunshine Coast, dan Crawford fund.

Akhirnya dengan memohon tuntunan dan rahmat serta bimbingan Tuhan yang maha kuasa dan dengan seijin semua yang hadir pada acara ini, saya membuka acara lokakarya internasional pembangunan pedesaanan terpadu ini dengan resmi. Kiranya tuhan memberkati kita sekalian.

**“INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT IN EAST NUSA TENGGARA”
INTERNATIONAL WORKSHOP
OPENING SPEECH
COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENTS OF THE NORTHERN
TERRITORY OF AUSTRALIA AND EAST NUSA TENGGARA**

Piet Alexander Tallo, SH
Governor of East Nusa Tenggara

The honourable:

- Chief Minister of the Northern Territory
- Head of DPRD East Nusa Tenggara province
- Members of Musyarawah Pimpinan Daerah (District Leaders Forum)
- Heads or representatives of agencies / bodies / bureau/ office
- Civil and military officers
- Speakers and workshop attendees

Beloved attendees,

First of all, I would like to ask you all to pray to God; it is because of his love and consent that we are able to attend this important event.

What we are doing here today is proof of God’s love for all of us. We have been given an opportunity to exchange ideas in a family atmosphere and we should understand that nothing happens by accident. Everything is part of a holistic connection between God’s plans for humans, human plans for other humans, and human plans for their environment, all of which have the common goal of improving human welfare. Next, I would like to thank the Australian government which has given support and assistance to the Indonesian government and the government of East Nusa Tenggara Province.

We are all aware of the collaboration that has occurred since the 1970s on rural development through sector-based projects. Over the past two years there has also been successful collaboration between Australia and Indonesia on a fire management program for East Sumba and Ngada districts.

During the project, many aspects have been researched, with particular attention given to examining the relationship between natural resources and rural development. As a result we have found a clear need for intensive collaboration between local communities, local government, NGOs and Universities through a community-based approach. This approach gives an opportunity for Integrated Rural Development to improve community welfare. In general, East Nusa Tenggara has a dry environment with low rainfall. The unique environment of NTT means there is a great need for increased land management skills to improve food security and reduce poverty for rural communities in an environmentally sustainable manner.

Villages are ‘hinterlands’ of cities which rely on agriculture as the dominant livelihood. Agriculture therefore forms an important basis for development in East Nusa Tenggara.

Government policy has supported the extension and intensification of the agriculture sector through the distribution of assets and tools, improving seed quality, planting methods and livestock rearing to increase production. To encourage economic growth

there need to be improvements in irrigation systems, credit schemes for farmers, and farmers need to be assisted to become more creative in their farming practices.

The reality is rural that agriculture is still limited to subsistence farming producing development approach to address this issue.

It is hoped that local wisdom can be integrated into efforts to increase agricultural productivity in a holistic way. I hope that through this international workshop, we can establish a strategic commitment amongst the international community to address sustainable integrated rural development in partnership with governments, NGOs, funding agencies and education institutions.

An important criterion for strategic development of the NTT region should be 'growth through equitable distribution'. This should not be limited to sharing of resources, but should have a more dynamic meaning that addresses the empowerment of communities through three pillars, that is, human resources, economics and law. These should be enabled through improved access to community resources, bureaucratic transformation and increased efficiency within government, the public service and using social capital to manage community participation.

Local wisdom allows appropriate development using available resources. This is in line with the Millenium Development Goals which prioritise environmental conservation and global partnerships. All of us who cherish humanitarian values should work together, support and strengthen each other to improve community well-being.

I believe that this international workshop has an important agenda to discuss issues and agree on recommendations for future implimentation. I hope that participants can discuss the issues seriously in order to make recommendations for the East Nusa Tenggara Government, NGOs, education institutions and the international community.

I would also like to take this chance to give my sincere thanks to the Australian funding bodies for running this workshop. They are the Northern Territory Government, Charles Darwin University, ACIAR, AusAID, Tropical Savannas Cooperative Research Centre, University of the Sunshine Coast and the Crawford Fund.

Finally, I would like to ask for God's guidance and request your permission to formally open this Integrated Rural Development International Workshop. God bless us.

PEMBUKAAN LOKAKARYA PEMBANGUNAN DESA TERPADU DI KUPANG

Clare Martin, MLA
Chief Minister of the Northern Territory and
Minister for Asian Relations and Trade, NT, Australia

Selamat datang di lokakarya Pembangunan Pedesaan Terpadu. Hormat saya khususnya untuk Gubernur Piet Tallo yang keterlibatannya menunjukkan betapa pentingnya forum ini. Dengan sangat menyesal saya tidak dapat menghadiri acara ini, namun saya sangat senang mengetahui hadirnya wakil-wakil forum pemerintah, dinas, badan pendidikan dan penelitian, lembaga sosial masyarakat dan badan keuangan baik Indonesia maupun Northern Territory.

Seperti yang telah diketahui bersama, Proyek ACIAR telah terselesaikan pada bulan Juni 2005. Hal ini telah membantu sejumlah masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam peningkatan pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan, begitu juga dalam penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai pemerintah Indonesia pada *Geographic Information System* serta pemetaan lahan dan kebakaran. Kesuksesannya telah banyak menunjukkan tentang organisasi di Nusa Tenggara Timur seperti BAPPEDA, Departemen Pertanian dan Kehutanan, Lembaga Sosial Masyarakat dan universitas di Sumba dan Salatiga, begitu juga organisasi di Northern Territory seperti, Charles Darwin University, Tropical Savannas CRC, dan Northern Territory Bush Fire Council. Akan tetapi yang terpenting adalah, Proyek kebakaran ACIAR telah menghasilkan kerjasama yang mantap dan kuat antara Nusa Tenggara Timur dan Australia Utara. Hal ini telah memuluskan jalan kerjasama kedepan dalam kegiatan seperti lokakarya yang kita hadiri hari ini.

Lokakarya ini merupakan kesempatan luar biasa untuk menjelajahi berbagai jalan untuk dapat bekerjasama di masa yang akan datang khususnya dalam pembangunan pedesaan terpadu di Nusa Tenggara Timur. Kita telah menjalankan kerjasama selama lebih dari satu abad dan sangat penting bagi kita untuk terus mempelajari kesalahan yang telah terjadi dan membangun diatas pondasi yang kuat yang telah kita letakkan pada pengelolaan sumber daya lahan.

Pembangunan pedesaan terpadu dan pengelolaan lahan merupakan isu besar di wilayah kami, khususnya ketergantungan terhadap sumber daya alam dan pertanian. Hal ini juga sangat penting bagi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha pedesaan yang berkelanjutan.

Selang beberapa waktu, Australia Utara telah menjalin kerja sama dengan Nusa Tenggara Timur dalam berbagai proyek, termasuk proyek peternakan. Sebagai contoh, di tahun 1997 perjanjian kerjasama telah ditandatangani antara the Northern Territory Department of Primary Industries, Fisheries and Mines, Perikanan, dan Pertambangan serta Badan Pengkajian Tehnologi Pertanian NTT di Kupang. Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa kerjasama proyek, pertukaran informasi dan presentasi pada seminar regional.

Dalam lokakarya ini kita akan membangun pada badan tersebut untuk bekerja dan menjelajahi kesempatan-kesempatan untuk bekerja sama di bidang seperti pertanian pangan dan kehutanan yang akan memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, Australia Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kita juga memiliki Pengetahuan yang cukup di bidang pemetaan penggunaan lahan dan praktek pertanian terbaik dan kami berharap untuk dapat berbagi dengan Nusa Tenggara Timur pada proyek-proyek yang akan datang.

Charles Darwin University dewasa ini tengah bekerja pada proyek pembangunan kapasitas yang di biyai oleh AusAID melalui *Public Sector Linkage Program* yang bertujuan untuk memperbaiki kapasitas pengelolaan lahan untuk pengembangan pedesaan di Indonesia Timur yang berkelanjutan.

Kami berkomitmen untuk memperkuat kerjasama tiga Negara dalam wilayah di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Hal ini telah berlangsung di bidang pendidikan, kesehatan dan olah raga. Bahkan, saya sangat berbahagia bahwa Northern Territory akan mengirimkan tim *football* ke Kupang akhir bulan ini dalam rangka perayaan ulang tahun Kota Madya Kupang.

Saya juga berharap untuk dapat mengunjungi Kupang dalam waktu dekat untuk menyampaikan sambutan pada seminar international tentang Membangun dan Mengembangkan hubungan format tiga Negara antara Kupang-Darwin-Dili pada bidang Pariwisata, Pendidikan dan Ekonomi.

Kami mempunyai keinginan dan harapan yang kuat dalam wilayah kami untuk dapat bekerja secara dekat dengan teman-teman kami di sebelah utara. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lokakarya ini termasuk para sponsor dan peserta. Saya berharap anda semua tetap dalam keadaan baik hingga beberapa hari mendatang serta menjadi harapan kami agar kebjajikan dan persahabatan yang ada diantara kita akan terus berlanjut untuk lebih diperkuat dan dikembangkan di tahun-tahun kedepan.

Terima kasih.

OPENING ADDRESS
CHIEF MINISTER OF THE NORTHERN TERRITORY
Clare Martin, MLA

Chief Minister of the Northern Territory and
Minister for Asian Relations and Trade, NT, Australia

Welcome to the Integrated Rural Development Workshop. I'd particularly like to pay my respects to Governor Piet Tallo whose involvement today demonstrates the importance of forums such as this. I'm disappointed I can't be with you in person but I'm delighted that both Indonesia and the Northern Territory have such a strong presence, with representatives from government agencies, education and research institutions, non-government organisations and funding agencies.

As you are aware, the ACIAR fire project was completed in June 2005. It has helped a number of Nusa Tenggara Timur communities improve their fire management planning and practices, as well as providing training for Indonesian government officers in geographic information systems and land and fire mapping. Its success says a lot about organisations in Nusa Tenggara Timur like BAPPEDA, the Department of Forestry and Agriculture, non-government organisations and universities in Sumba and Salatiga, as well as organisations in the Northern Territory, such as Charles Darwin University, Tropical Savannas CRC, and the Bushfires Council of the Northern Territory. But most importantly, the ACIAR fire project has produced firm relationships and a strong sense of goodwill between Nusa Tenggara Timur and the Territory. It has paved the way for future collaborative activities like the workshop we are attending today.

This workshop is a tremendous opportunity to explore other ways we can cooperate in the future and, in particular, in the area of integrated rural development in Nusa Tenggara Timur.

We've been working together for more than a decade now and it's vital we continue to learn from past experiences and build on the strong foundation we have laid in the area of land resource management.

Integrated rural development and land management are big issues in our region, especially given our reliance on natural resources and agriculture. And it's vital that our natural resource management and rural enterprise development is sustainable.

Over the years, the Territory has worked with Nusa Tenggara Timur on a range of projects, including livestock projects. For example, in 1997 a cooperation agreement was signed between the Northern Territory Department of Primary Industry, Fisheries and Mines and the NTT Assessment Institute for Agricultural Technology in Kupang. This agreement resulted in a number of collaborative projects, information exchanges and presentations at regional seminars.

During this workshop we'll be building on that body of work and exploring opportunities for collaboration in areas such as foodcrops and forestry that will benefit both the Territory and Nusa Tenggara Timur. We also have significant knowledge of land use mapping and agricultural best practice and we look forward to sharing this with our Nusa Tenggara Timur partners in future projects.

Charles Darwin University is now working on a capacity building project funded by AusAID through the Public Sector Linkage Program. Its aim is to improve land management capacity for sustainable rural development in Eastern Indonesia.

We are committed to strengthening trilateral cooperation in our region with Nusa Tenggara Timur and Timor Leste. This is already happening in the areas of education, health and sport. In fact, I'm very pleased that the Territory is sending a football team to Kupang later this month for the 10th anniversary celebrations of the Kupang Municipality. I am also looking forward to visiting Kupang in the near future to address the International Seminar on Establishing and Developing a Trilateral Relationship Format among Kupang-Darwin-Dili in Tourism, Education and the Economy.

We have a strong interest in our region and we want to work closely with our friends to the north. I would therefore like to thank everyone who has been involved in organising this workshop, including the sponsors and participants. I wish you all well over the next few days and it's my hope that the goodwill and friendship that exists between us continues to strengthen and grow in the years ahead.

PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU DI NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP KESEMPATAN, KENDALA DAN PILIHAN UNTUK MENINGKATKAN MATAPENCAHARIAN

Michael Blyth¹, Siliwoloe Djoeroemana², Jeremy Russell-Smith³, Bronwyn Myers⁴

¹ Director, Four Scenes Pty Ltd, PO Box 50 Kippax, ACT Australia 2615. Email: michael.blyth@fourscenes.com.au.

² Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba Timur, NTT. Email: siliwoloe2005@yahoo.com

³ Bushfires Council of NT, Darwin. Email: Jeremy.Russell-Smith@nt.gov.au

⁴ Universitas Charles Darwin, Darwin. Email: Bronwyn.Myers@cdu.edu.au

Abstrak

Makalah ini merupakan kumpulan kunci utama yang timbul dalam presentasi dan diskusi pada lokakarya serta penjabaran terhadap pelajaran penting yang dapat diambil untuk sukses masa depan program pembangunan desa terpadu demi peningkatan mata pencaharian di Nusa Tenggara Timur. Peningkatan program untuk pembangunan desa terpadu yang disepakati oleh peserta lokakarya telah pula di sampaikan. Telah disepakati bersama bahwa semestinya program tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan serta melaksanakan proposal proyek. Makalah ini juga melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh peserta lokakarya terhadap kesempatan untuk pembangunan pedesaan secara terpadu serta kunci kendalanya. Kendala-kendala tersebut dibedakan sesuai dengan tingkat kemampuan terhadap perubahan melalui proyek pembangunan desa terpadu. Garis besar dalam makalah ini adalah kesepakatan dalam rencana pelaksanaan untuk mengembangkan hasil dari lokakarya dan strategi dalam mempersiapkan proposal proyek pembangunan desa terpadu dengan sukses.

Pengantar

Dalam makalah tinjauan umum ini akan disampaikan sintesis masalah penting pada presentasi dan diskusi serta rekomendasi kunci yang telah disepakati oleh peserta yang hadir pada lokakarya pembangunan pedesaan terpadu (integrated rural development, IRD) di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diselenggarakan di Kupang, bulan April 2006. Meskipun pembangunan pedesaan terpadu merupakan sebuah pendekatan yang menarik dalam memperbaiki mata pencaharian penduduk desa di NTT, hal ini bukan

merupakan hal yang baru dan tidak selalu terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan. Makalah dan diskusi pada lokakarya ini mengidentifikasi bahwa kesuksesan IRD di masa yang akan datang memerlukan modifikasi mayor terhadap pola serta implementasi pendekatan yang akan digunakan.

Investasi yang telah lalu dalam pembangunan pedesaan terpadu di NTT telah gagal dalam memberikan janji keuntungan pada penduduk pedesaan. Kemiskinan, pengangguran, dan standar kesehatan tidak membaik. Penelitian terhadap masalah ini dan kegagalan proyek-proyek serupa telah mengidentifikasi sejumlah keterpurukan proyek-proyek IRD dan ini telah digunakan sebagai bahan pemikiran ulang terhadap pendekatan serta pelaksanaannya. Dengan melihat kedepan, pembangunan desa terpadu di NTT akan berbasis pada kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami sehingga dapat mencakup prinsip-prinsip kunci terhadap pelaksanaan pendekatan yang sukses.

Kerjasama antara Australia Utara (Northern Territory) dan Indonesia Timur pada pembangunan desa terpadu telah terjalin sejak pertengahan tahun 1990an. Kerjasama tersebut diperkuat dan diperluas melalui dua proyek yang dibiayai oleh ACIAR, yaitu proyek pengelolaan kebakaran pada penataan lahan sabanah (Russell-Smith et al 2000 dan Russel-Smith et al.2007). Saat ini kapasitas pengelolaan lahan di Indonesia Timur (NTT) telah dikembangkan melalui proyek *AusAID Public Sector Linkage Program* antara Charles Darwin University dan BAPPEDA NTT (lihat situs proyek PSLP (<http://IndonNRMpslp.ehs.cdu.edu.au>)). Dalam laporan hasil lokakarya telah ditangkap beberapa pelajaran atas keberhasilan serta kegagalan dimasa lalu, baik dalam praktek maupun pendekatannya, dan focus pada aktivitas terpadu untuk masa datang demi tercapainya hasil pembangunan di pedesaan NTT yang berkesinambungan.

Tujuan dari lokakarya tersebut adalah untuk:

- meninjau kembali aktifitas yang berkenaan dengan perbaikan mata pencaharian di NTT
- membangun dan memperluas kolaborasi antara Indonesia dan Australia
- mengembangkan hubungan yang lebih luas dengan badan penyumbang dana (diluar Indonesia dan Australia)
- mendiskusikan arah kegiatan-kegiatan di masa depan.

Dalam tiga hari pelaksanaan lokakarya, Dua puluh tujuh presentasi disampaikan mengenai pendekatan pembangunan pedesaan terpadu, potensi dari berbagai bentuk usaha untuk NTT, aspek pengelolaan lingkungan, kegiatan LSM dalam mendukung penduduk desa, peran wanita, hak akan tanah dan kontribusi pendidikan serta kredit-mikro dalam pembangunan desa. Secara umum presentasi tersebut telah memenuhi tujuan yang pertama. Selanjutnya, hasil dari diskusi pleno dan diskusi kelompok-kecil juga ditambahkan pada tinjauan terhadap masalah serta kesempatan dalam memperbaiki mata pencaharian penduduk desa. Arah kegiatan kedepan telah di sampaikan dalam kajian prioritas untuk propinsi dan kesepakatan pada pendekatan pembangunan desa terpadu yang lebih baik. Telah diajukan bahwa pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai basis dalam pembuatan pola serta implementasi dari strategi penelitian dan proposal proyek untuk dipertimbangkan oleh badan penyumbang dana internasional.

Perwakilan dari empat badan penyumbang dana internasional juga telah memberikan presentasinya dalam lokakarya tersebut. Prospek dalam memperkuat dan memperluas kolaborasi antara Indonesia dan Australia di NTT didukung oleh keterlibatan aktif dari perwakilan organisasi terkait dari Australia dan NTT termasuk badan pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan organisasi penelitian nasional dan internasional. Seperti tercermin dalam presentasinya mengenai pentingnya kolaborasi, Dr Frans Seda menyampaikan nilai yang terkandung dalam kerjasama antara NTT dan Northern Territory selama lebih sepuluh tahun pula disampaikan bahwa hal ini merupakan jalan setapak menuju pembangunan desa terpadu di NTT.

Hasil yang diharapkan dari lokakarya tersebut termasuk:

- pelajaran (keberhasilan dan keterbatasan) dari kegiatan masa lalu serta saat ini di NTT dalam kaitannya dengan pendekatan pembangunan desa terpadu.
- mengidentifikasi kesempatan dan kendala untuk pembangunan desa terpadu di NTT
- kesepakatan pada prioritas pembangunan desa terpadu untuk NTT dan daerah yang berpotensi untuk kolaborasi antara organisasi Indonesia dan Australia

Tiga hasil tersebut diatas merupakan struktur pada makalah tinjauan umum ini.

Pelajaran yang didapat untuk suksesnya pembangunan pedesaan terpadu di masa depan

Pada sambutan pembukaan lokakarya yang disampaikan oleh bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur disebutkan bahwa pembangunan desa terpadu adalah mengenai penyediaan kesempatan pada penduduk desa untuk memperbaiki kehidupan mereka yaitu dengan bergerak dari prokusi untuk nafkah belaka menuju ke produksi untuk komersil dengan cara yang berkelanjutan. Beliau mengajukan bahwa pembangunan desa terpadu memerlukan masukan pengetahuan, dukungan kebijakan pemerintah pelayanan pemerintah dan pembangunan prasarana, akses financial serta komitmen untuk bekerja sama baik local maupun internasional. Northern Territory Chief Minister pada sambutannya menggambarkan bahwa pembangunan desa terpadu sebagai integrasi pengembangan kegiatan usaha pedesaan dan membangun pengelolaan sumber alam pada pengetahuan yang kritis serta pembangunan kapasitas. Chief Minister juga mengungkapkan pentingnya tindakan yang berkelanjutan.

Profesor Saragih menyampaikan makalahnya mengenai sistem agribisnis sebagai contoh dari pada IRD, pengintegrasian antara produksi pertanian dengan pemasok masukan dari hulu, pemroses dari hilir dan dari segala sektor serta pelayanan yang mendukung usaha tersebut termasuk didalamnya adalah pelayanan prasarana pemerintah, perbankan dan pelayanan finansial. Bapak Saragih menekankan bahwa dalam sistem agribisnis semua pihak terkait akan mendapatkan keuntungan atas perkembangannya termasuk petani, pasar, pemroses, eksportir dan konsumen.

Djoeroemana, Salean dan Nope mengungkapkan bahwa pembangunan pedesaan terpadu telah gagal dalam memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan karena mereka sentralis,

tehnokratis, dan fokusnya sempit dalam meningkatkan produksi pertanian. Kemiskinan masih meluas di kalangan rumah tangga di NTT yaitu sekitar 60% dari jumlah penduduk yang tergolong miskin di tahun 2005. Upaya-upaya masa lalu telah gagal karena mereka tak menghiraukan tindakan berkelanjutan, konteks local, pembangunan kapasitas local, dan partisipasi masyarakat. Djoeroemana, Salean dan Nope mengajukan pendekatan alternatif untuk pembangunan pedesaan terpadu yang menekankan pembangunan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan. Mereka menyadari bahwa pembangunan pedesaan terpadu harus mencakup sector fisik, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Dirincikan bahwa pendekatan pembangunan pedesaan terpadu mereka sebagai pendekatan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.

Elemen-elemen kunci dari pendekatan mata pencaharian penduduk desa yang berkelanjutan untuk membangun pedesaan terpadu adalah:

- berpusat pada masyarakat dan dikendalikan masyarakat
- pendekatan holistik yang dibangun atas dasar pengetahuan yang telah ada pada masyarakat mengenai kesempatan, kendala serta kapasitasnya untuk peningkatan dan pertumbuhan
- didamik dan bersedia untuk berubah, dengan berbagi dalam belajar dan memonitor partisipasi
- berfokus pada pembangunan kapasitas untuk individu dan jaringan sosial yang dapat meningkatkan potensial yang ada demi mencapai sasaran
- harus dibangun atas dasar pemahaman setara dalam berbagai permasalahan yang relevan serta konteksnya dengan masyarakat kecil dan kebijakan serta strategi makro dan segala kaitannya
- adanya kelangsungan dan keberlanjutan suatu proses dan hasil dalam suatu siklus

Usulan mereka pada lokakarya yaitu bahwa pembangunan mata pencaharian penduduk desa yang berkelanjutan memerlukan integrasi fisik, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Mereka mengajukan suatu sistem untuk dapat dipertimbangkan.

Presentasi pada pendekatan pembangunan desa terpadu menimbulkan komentar yang mendukung dari para peserta yang menambahkan pentingnya factor-faktor tersebut dibawah ini:

- memahami karakteristik khusus dari penduduk setempat, kepribadian penduduk yang merupakan fokus pada perencanaan pembangunan desa terpadu
- penyediaan bimbingan teknis jangka panjang dan bimbingan agribisnis melalui keterlibatan masyarakat dengan pihak yang sesuai menurut budaya mereka.
- perlunya mekanisme untuk menghubungkan penelitian, kebijakan dan perencanaan.
- dengan menggunakan pembagian area agro-ekologi, mikro ekologi pasar, agro-sosial-budaya.
- strategi pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat (pemusatan masyarakat)
- peran wanita dalam pemecahan lingkaran kemiskinan.
- menghindari kelemahan yang dialami pada proyek IRD yang lalu yaitu yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Tabel 1 rangkuman atas butir-butir yang di buat dari makalah yang disampaikan serta diskusi pleno pada lokakarya. Dalam tabel tersebut tercantum tuntunan untuk pengembangan usulan proyek yang direncanakan berdasar pada pembangunan pedesaan terpadu serta untuk pengelolaan proyek IRD.

Tabel 1. Pelajaran yang diperoleh untuk perbaikan perbaikan rancangan dan implementasi dalam proyek pembangunan pedesaan terpadu

Area	Kelemahan masa lalu	Menuju sukses
Lingkungan institusional	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol dari atas ke bawah oleh pemerintah pusat dan lembaga bantuan • Pengendalian persediaan merupakan pengendalian permintaan (menggunakan pengendalian masyarakat) • Proyek yang di selenggarakan memiliki unit pengelolaan, yang tidak melalui lembaga setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendesentralisasikan kendali • Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi • Membangun komitmen untuk menuju sasaran proyek • Memenuhi kebutuhan penduduk setempat • Melibatkan peserta local melalui organisasi lokal • Membangun kepemilikan bersama melalui pengelolaan bersama inisiatif • Mengembangkan dan mengadopsi rancangan institusional dalam mengkordinir pembuatan keputusan dalam masyarakat, antar masyarakat, dan antara masyarakat dengan pihak terkait seperti pemerintah dan organisasi sosial
Rancangan dan implementasi proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Buruknya rancangan proyek atas dasar pengkajian permasalahan yang buruk • Perhitungan yang tidak tepat mengenai kondisi setempat – sosial, budaya dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibilitas pola proyek • Lokasi – akan membentuk pola proyek informasi dan implementasiannya • Sumber pengetahuan setempat
Hubungan pengelolaan dan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Buruknya interaksi antara pemeran proyek dan orang – orang yang akan menanggung akibat hasil dari proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa modal sosial dan penerapan institusional • Menciptakan jaringan di dalam masyarakat dan membangun kepercayaan
Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang diberikan pada staff local tidak mencukupi • Perhatian yang tidak memadai untuk perawatan yang berkelanjutan perlengkapan dari proyek yang dibeayai dan kapasitas local untuk melanjutkannya setelah pelaksanaan proyek • Gambaran waktu proyek terlalu pendek untuk penyampaian hasil selama fase implementasi • Rendahnya keterlibatan dan kepemilikan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih staf local supaya dapat melanjutkan setelah selesainya proyek. • Investasi perlengkapan harus dijaga sesuai dengan kapasitas perawatan dari masyarakat setempat • Pemaduan proyek kedalam institusi yang ada • Gambaran waktu proyek harus jelas • Keterlibatan masyarakat harus ada ditiap tahap proyek

Kesempatan dan kendala pada pembangunan pedesaan terpadu

Presentasi yang disampaikan dalam lokakarya menyebutkan berbagai kesempatan serta kendala dalam pembangunan pedesaan terpadu. Beberapa makalah, seperti yang disampaikan oleh Masadu mengenai kepemilikan lahan dan yang disampaikan oleh Siagian dan Rozali mengenai kredit-mikro, menyebutkan keterbatasan khusus untuk

pembangunan desa terpadu di NTT. Sementara yang lain menyampaikan bahwa faktor fisik, ekonomi dan lingkungan serta kelembagaan telah mempengaruhi usaha-usaha seperti pertanian, peternakan dan kehutanan. Dalam presentasi juga disebutkan tentang peran wanita, pengelolaan lingkungan serta peran dari LSM. Selama lokakarya tersebut, peserta bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi serta mendiskusikan kesempatan dan kendala dalam membangun desa terpadu dengan berdasarkan pada presentasi, diskusi pleno, dan pengetahuan serta pengalaman masing-masing. Hasil dari diskusi kelompok tersebut dirangkum dalam tabel 2, 3 dan 4.

Tabel 2. Kesempatan untuk pembangunan pedesaan terpadu (IRDO)

IRDO	Area komponen			
Wana tani terpadu	Pohon penghasil kayu yang bernilai tinggi	Kayu untuk bahan bakar	Tanaman pakan ternak	Ternak kecil
	Kayu untuk bahan bakar	Perlindungan DAS		
	Pemanenan yang berkelanjutan pada sumber daya alam hutani		Hasil tanaman umur panjang tahun – Mede, kopi dan lainnya	
Pemrosesan kayu	Kayu untuk konstruksi	Produk nilai tambah	Pabrik penggilingan	
Produk hutan non-kayu	Lak	Zat pewarna kain	minyak	Madu, buah, gula aren
	Rotan	Bumbu-bumbu	Obat-obatan	Kacang-kacangan
Sistem tanam berkelanjutan	Hortikultura	Tanaman musim kering yang baru	Tanaman rentetan – contoh, <i>N fixation</i>	Usahatani subsisten
	Perlindungan panen			
Sistem peternakan berkelanjutan	Peternakan sapi yang semi-intensif	Produksi ternak kecil	Tanaman pakan ternak	Usaha ternak subsisten
	Pengendalian penyakit pada ternak			
Proses pasca panen	Hasil tanaman	Hasil ternak	Transportasi, pengemasan dan penyimpanan	
Kerajinan tangan	Tenun	Ukiran kayu.	Wewangian	
Pemasaran hasil pertanian	Kebijakan penentuan harga	Koperasi	Pembangunan pasar-kaitannya dengan pedagan eceran	Analisa pasar
	Peran wanita dalam pemasaran	Perbedaan produk	Perdagangan lintas batas dengan Timor Leste	
Pariwisata	Eco-Pariwisata	Pariwisata pertanian	Pariwisata kebudayaan	
Pengelolaan perikanan pesisir pantai yang berkelanjutan	Perlengkapan dan ketrampilan	Pemrosesan	Pembangunan pasar dan prasarana	Pengelolaan perikanan dan peran pemerintah

Tabel 3. Kesempatan pembangunan pedesaan terpadu – Pengelolaan DAS terpadu (IRDO)

IRDO	Wilayah komponen			
Pengelolaan DAS terpadu	Memperbaiki persediaan air dan kualitasnya	Pengelolaan kebakaran	Pengelolaan rumput liar	Pertanian campuran
	Pengelolaan aliran sungai	Penanaman sesuai dengan persediaan air	Tanaman rentetan – contoh N fixation	Usahatani subsisten
	Tanaman musim kering yang baru	Ketahanan pangan	Kondisi iklim	Pengetahuan atau kebijakan local dan tradisional
	Kesehatan dan gizi manusia	Air minum	Hutan sebagai sumber ketahanan air	
	Pengelolaan sumber daya pesisir pantai terpadu		Pertemuan aliran sungai dari hulu dan hilir	

Tabel 4. Kendala dalam pembangunan pedesaan terpadu

Kendala area	Kunci kendala
Modal sosial	Kesetaraan gender dan kesempatan bagi wanita Demografi sosial Pengetahuan local/tradisional Kesehatan dan gizi manusia - malaria Keterbatasan tenaga kerja – kompetisi antara pertanian dan sector lain, pentingnya pertanian sebagai karir menurun Kepemimpinan
Budaya	Kepadatan penduduk Berorientasi pada usahatani subsisten tanaman Pencurian hasil panen Perbedaan bahasa Buta huruf
Masalah kepemilikan lahan	Tidak jelasnya penggunaan dan fungsi lahan Reformasi perencanaan penggunaan lahan Tidak ada kepemilikan perorangan untuk penduduk desa
Prasarana dan kapasitas pasar	Telekomunikasi Jalan Pelabuhan Perlengkapan – Listrik, sanitasi, air bersih Investasi jangka panjang
Pemasaran	Pembangunan system pemasaran Akses terhadap kecerdasan pasar Penyediaan rantai prasarana – Penyimpanan, pengendalian, angkutan. Sertifikasi untuk hasil panen yang organic
Pengadopsian teknologi	Penolakan masyarakat terhadap teknologi baru Produktifitas masyarakat yang rendah
Pengaturan institusional –	Komitmen pemerintah Komitmen LSM

Kendala area	Kunci kendala
kepemerintahan dan kebijakan	Kordinasi pihak terkait Hubungan pemerintah regional, propinsi dan nasional Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Aspek gender Jauhnya NTT dari Jakarta yang merupakan pusat pembuatan keputusan Memperkuat Institusi Perluasan pelayanan Akses informasi dan tehnologi telekomunikasi
Akses pelayanan financial	Kredit - mikro Bantuan Keterbatasan modal
Pengetahuan, keahlian dan pelatihan	Pengetahuan iklim Pengetahuan pertanian dan peternakan Rendahnya tingkat pendidikan formal Kwalitas menegemen (pengetahuan dalam bidang menegemen) Kurangnya kapasitas penelitian dan pendidikan pasca sarjana Kurangnya kurikulum multidisplin dan terpadu Kecenderungan untuk berfokus pada ilmu murni dan bukan kurikulum yang mengarah kepada matapencaharian Akses terhadap informasi dan tehnologi Informasi pasar
Lingkungan alami	Bencana alam Harma dan penyakit Keterbatasan air – curah hujan Tipisnya humus Iklim

Sebelas kesempatan pembangunan desa terpadu (IRDO) telah didefinisikan, berdasar pada pengelompokan berbagai kegiatan dan usaha yang diajukan oleh peserta lokakarya. Sifat dasar IRDO telah terbukti pada beberapa hal seperti pembagian komponen kegiatan antara IRDO (seperti; tumbuhan pakan ternak sebagai bagian dari gabungan usaha wana tani dan usaha peternakan yang berkelanjutan) dan terkait pula dalam mata rantai perikanan pesisir pantai yang berkelanjutan. Percampuran factor produksi dan lingkungan secara jelas digambarkan dengan pengelolaan DAS terpadu IRDO yang disebutkan dalam Tabel 3. IRDO telah menarik banyak komponen dari sepuluh komponen lainnya begitu pula factor kwalitas lingkungan. Begitupun pemasaran produk pertanian IRDO mencakup komponen-komponen yang ada pada komponen IRDO lainnya.

Kesempatan pembangunan desa terpadu berkembang tidak hanya terbatas pada produksi pertanian tetapi juga termasuk pengaturan penyediaan pasokan, factor institusi dan efisiensi oprasional pada rangkaian pasokan produk serta pasar untuk hasil pertanian. Kotak 1 berisi diskripsi wana tani IRDO yang dipersiapkan oleh kelompok kecil dalam lokakarya. Juga disebutkan tantangan yang dihadapi para petani, agen pemasaran, pemerintah dan penduduk desa dalm mengimplementasi inisiatif tersebut. Contoh ini merupakan khasnya kesempatan pembangunan desa terpadu dan perubahan yang diperlukan demi keberhasilan serta kelanjutan pelaksanaannya.

Kendala dalam pembangunan desa terpadu terbagi dalam sepuluh area: sosial, budaya, kepemilikan lahan, kapasitas prasarana, pemasaran, tehnologi, pengaturan institusi, pelayanan keuangan, pengetahuan, keahlian dan pelatihan dan lingkungan alam. Tabel 4

menyebutkan kendala yang disampaikan oleh kelompok kecil dalam lokakarya. Perubahan dari hal ini akan berpengaruh pada suksesnya proyek IRD. Kendala mungkin langsung disebutkan pada bagian integral dari strategi proyek dalam mencapai tujuan IRD. Akan tetapi, sepertinya pengaruh terhadap kendala berbeda dari area satu dengan yang lainnya. Bagan 1 menunjukkan potensi untuk mempengaruhi kendala di masing-masing daerah melalui proyek IRD. Kendala dengan potensial rendah harus di rubah, mengingat pentingnya pada keberhasilan proyek IRD, biasanya disampaikan langsung dan/atau bagian dari batasan reformasi atau inisiatif pembangunan. Sebagai contoh, keputusan pada investasi dan perawatan sarana telekomunikasi dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda pembangunan telekomunikasi nasional. Dalam proyek IRD tipe kendala seperti ini harus dapat di toleransi.

Kendala yang mempunyai potensi menengah harus dipengaruhi melalui proyek IRD yang dimanipulasi untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin tanpa harus memodifikasi kendala secara permanen. Sebagai contoh, komitmen pemerintah dan pihak terkait dapat terwujud dalam suatu proyek tertentu dengan kepastian atas partisipasi masing-masing pihak dan dengan komunikasi yang reguler dalam jangka waktu proyek yang ditentukan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa pihak terkait akan selalu berkomitmen pada proyek IRD. Seperti halnya dengan teknologi yang memberikan perlindungan terhadap bencana alam, tapi tidak dapat mencegah terjadinya bencana. Kendala yang memiliki potensial tinggi untuk dirubah harus dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa di transformasi secara permanen. Sebagai contoh, dengan menggabungkan pembangunan kapasitas sebagai peserta kunci proyek (petani, pedagang, pelayanan pemerintah) dalam proyek IRD, pengetahuan baru dapat dilekatkan dalam masyarakat, pengolah dan kelangsungan proyek. Dalam banyak kasus kendala seperti ini dieliminasi.

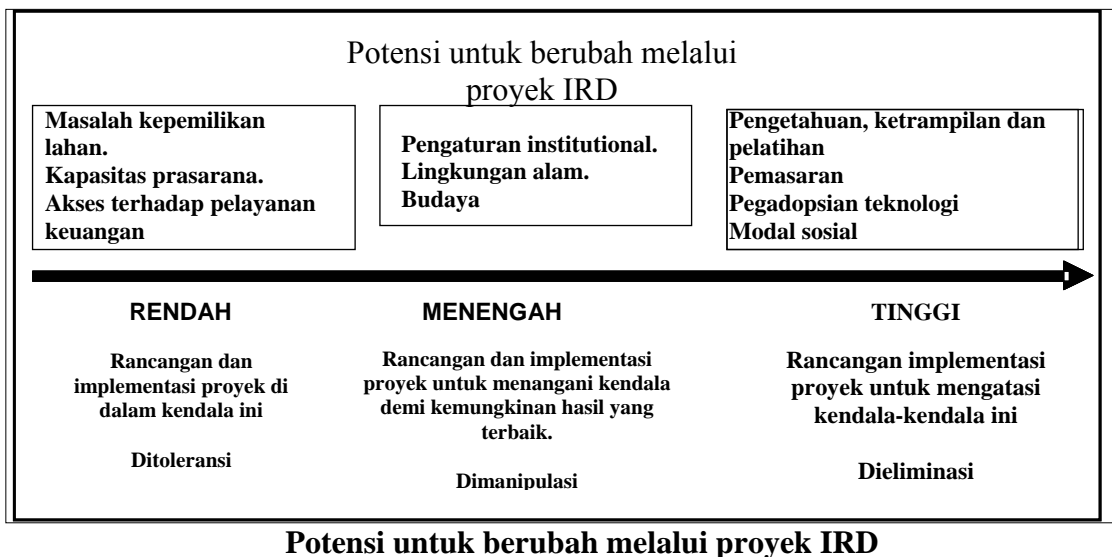
Kotak 1. Wanatani terpadu

Penanaman campur antara tumbuhan kayu nilai tinggi dengan tanaman pakan ternak dapat termasuk dalam Wana tani terpadu, termasuk juga pengikat lembu, tanaman yang dapat dipanen dan kegiatan pertanian lainnya. Masalah penting yang lain adalah memutuskan keseimbangan optimal antara komponen kegiatan dan penetapan alur keuangan yang diperlukan mengingat jangka waktu yang lama untuk memanen tumbuhan kayu. Strategi amat diperlukan untuk memperbaiki cara yang dilakukan saat ini.

Dengan membawa penghasilan tambahan dan penyediaan penahanan ekonomi selama masa sulit. Perpaduan jenis tanaman apa yang diperlukan dan pelatihan apa yang di jalankan, seperti pemanenan, pemangkasan, dan pengurusan untuk kayu? Keberhasilan usaha wana tani tergantung pada dukungan pasar, pemerintah dan pengaturan institusional. Sebagai contoh, Penyelesaian masalah kepemilikan lahan akan memfasilitasi perluasan wanatani di NTT. Kalau itu belum tercapai, bagaimana pemilik tanah akan meragukan apakah wanatani terpadu dapat membawa pendapatan yang memuaskan? Pelatihan kepemimpinan dan komunikasi petani ke petani juga diperlukan. Begitu pula pengguna lahan memerlukan pelatihan mengenai pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian. Analisa pasar dan informasi pasar akan diperlukan dan pembuatan kelompok tani atau koperasi mungkin juga perlu. Investasi tehnologi disamping pertanian akan diperlukan untuk efisiensi pengolahan dan penanganan produk. Sistem pemasaran perlu dikembangkan dan diperbaiki untuk menjamin produksi pertanian mencapai kebutuhan konsumen. Di saat system wanatani terpadu di tambah dengan keragaman pengguna lahan, bukan berarti bebas resiko. Kemungkinan akan gagal panen perlu dikaji.

Sebuah kelompok memberikan komentar bahwa wanatani terpadu berpotensi untuk ketahanan pangan, penyediaan air dan konstruksi meterial. Lebih dari pada itu, penanaman hutan akan mengurangi tekanan pada ketidak bertahannya panen pada hutan alami.

Makalah oleh Roshetko *et al* dan Narwir *et al* memberikan tilikan nilia dan pelajaran untuk keberhasilan pembentukan dan pengelolaan usaha wanatani.



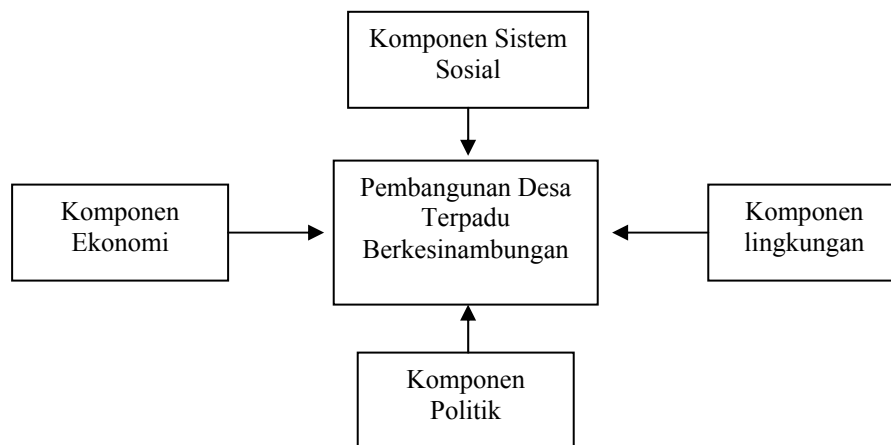
Bagan 1. Potensi untuk mempengaruhi kendala yang ada melalui proyek pembangunan pedesaan terpadu

Kepastian prioritas proyek IRD harus mempertimbangkan ukuran dan distribusi dari potensi keuntungan pada masing-masing kesempatan termasuk ekonomi, lingkungan dan keuntungan sosial dan akibat alami dari kendala dalam mencapai keuntungan termasuk kapasitas penduduk untuk terus melanjutkan usaha serta pengolahannya.

Prioritas pembangunan desa terpadu.

Pada waktu prioritas didiskusikan pada diskusi pleno dalam lokakarya salah satu IRDO yang menonjol adalah: pengelolaan DAS terpadu. Hal ini terjadi karena banyaknya komponen yang terserap dari IRDO lain. Akan tetapi, bukan berarti sepuluh IRDO lainnya tidak penting. Justru, paling besar terungkap dalam diskusi pada prioritas yaitu kebutuhan fundamental yang berupa kerangka kerja atau strategi untuk rancangan dan implementasi dari proyek pembangunan pedesaan terpadu.

Pendekatan mata pencaharian penduduk desa berkelanjutan terhadap IRD yang di ajukan oleh Djoeroemana, Salean dan Nope mendapat dukungan kuat dari peserta lokakarya. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa untuk menggunakan pendekatan ini sebagai basis strategi pengembangan penelitian hal ini dapat didiskusikan dengan pihak pemerintah dan badan bantuan internasional untuk mendefinisi proyek tertentu, mengingat pemahaman yang dimiliki mengenai prioritas tertentu pada wilayahnya. Pusat pendekatan mata pencaharian penduduk desa berkelanjutan adalah reproduksi yang ada pada Bagan 2. Elemen-elemen kunci lain dengan pendekatan yang tersebut diatas harus ditunjang dengan rancangan dan pengelolaan proyek (partisipasi, pengendalian masa, dasar pengetahuan, dinamika dan adaptasi, kapasitas bangunan, pemahaman setara antara semua pihak dan memahami pentingnya lingkaran dan kelanjutannya).

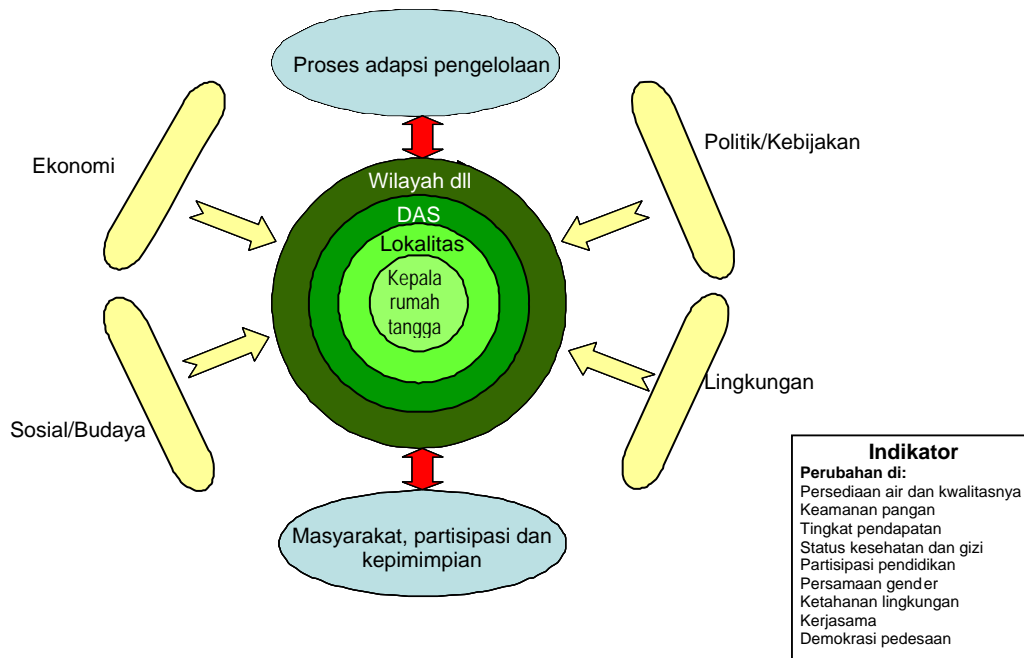


Bagan 2. Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan dalam pembangunan pedesaan terpadu

Bagan 2 menunjukkan model pemikiran. Sasaran dari pembangunan desa terpadu berkelanjutan mungkin dikendalikan oleh salah satu dari empat komponen dari model tersebut, tapi tentu saja tak akan tercapai kecuali dengan adanya hubungan antara empat komponen yang disampaikan dalam presentasi. Sebagai contoh, pengendali utama untuk perbaikan mungkin perekonomian yang memperbaiki sistem pemasaran dari pemanenan pertanian dalam sebuah kabupaten atau kecamatan. Disaat menarik efisiensi dan efektifitas dari system pemasaran memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa, solusi terhadap mata pencaharian berkelanjutan harus juga dipertimbangkan sebagai kepentingan kritis pada hubungan manusia untuk pemasaran yang sukses, peran pemerintah dalam menyediakan prasarana kunci seperti pelayanan jalan, telekomunikasi dan kebijaksanaan yang mendukung, serta kapasitas lingkungan fisik untuk produksi yang berkelanjutan demi memenuhi permintaan pasar. Kesuksesan proyek IRD untuk memperbaiki sistem komoditi pasar harus saling berhubungan dengan sosial-budaya, politik, dan elemen lingkungan dengan pengendalian terhadap elemen ekonomi.

Salah satu contoh lain yang juga didiskusikan dalam lokakarya dan terus dikembangkan adalah pengelolaan DAS terpadu. Dalam kasus tersebut tenaga penggerak utama berasal dari elemen lingkungan seperti pelestarian sumber air yang sulit didapat dan perlindungan terhadap vegetasi yang masih tersisa dan sumber daya tanah. Tenaga penggeraknya mungkin juga dari elemen lingkungan seperti dalam bentuk kebutuhan terhadap sumber air minium yang bersih dan untuk memperbaiki kesehatan dan gizi pada masyarakat yang termasuk dalam DAS. DAS terdefinisi sebagai ruang untuk proyek. Bagan 3 menunjukkan Pendekatan Partecipasi Pengelolaan DAS terpadu/ *Participative Integrated Catchment Management Approach* (PICMA) untuk IRD yang berdasar pada konsep Djoeroemana, Salean dan Nope tentang mata pencaharian penduduk desa terpadu.

Komponen penting dalam pendekatan ini adalah pengawasan aktif terhadap hasil yang direncanakan dengan menggunakan indikator kunci kinerja, seperti perubahan persediaan air dan kualitasnya, ketahanan pangan, tingkat pendapatan, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, kerja sama dan kolaborasi dan demokrasi pedesaan (lihat Tabel 3). PICMA menyampaikan pentingnya partisipasi pihak terkait dan menerima proses pengelolaan yang berlangsung.



Bagan 3. Pendekatan partisipasi pengelolaan DAS terpadu

Strategi untuk pengembangan suksesnya proyek IRD di NTT

Perencanaan telah disepakati dalam kesimpulan yang diambil pada lokakarya. Termasuk didalamnya langkah-langkah tersebut dibawah ini:

- pendekatan kepada Gubernur NTT untuk memohon persetujuan atas hasil lokakarya dan proposalnya sebagai kegiatan di masa yang akan datang.
- membentuk panitia pengarah kecil yang melibatkan perwakilan penting dari pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, dan institusi penelitian untuk mengendalikan pendekatan pembangunan desa terpadu yang baru.
- pemberitahuan tentang perencanaan pembangunan pedesaan yang berlangsung saat ini di NTT
- mempengaruhi badan pemberi bantuan internasional dengan pengembangan inisiatif yang tengah berlangsung.
- pengembangan strategi penelitian dengan batas waktu.

Selanjutnya strategi penelitian dikembangkan dengan referensi khusus pada Pendekatan Partisipatif Pengelolaan DAS Terpadu, meskipun hal ini dirasa lebih luas tapi tercatat sebagai bagian dari langkah tersebut.

Bentuk dari pada kepanitiaan pembangunan pedesaan terpadu

Diusulkan kepada Pemerintah NTT untuk mengangkat panitia pengarah swatantra yang memberikan dalam pengendalian IRD di NTT. Panitia harus terdiri dari wakil-wakil pemerintahan, masyarakat, industri pedesaan, dan lembaga penelitian ilmiah dan komunitas pendidikan yang telah menunjukkan kepemimpinannya dalam pembangunan pedesaan. Panitia bertanggung jawab untuk memadukan, memprioritaskan, dan menggabungkan pembangunan pedesaan dengan beberapa komponen termasuk:

- permasalahan kunci daerah dan kesempatan
- sosial-budaya, ekonomi, politik dan lingkungan / masalah pengelolaan sumber alam
- permasalahan kunci sektoral, baik horizontal (antar sector) maupun vertical (dalam sector)
- keterlibatan pihak terkait, meyakinkan adanya perwakilan dari semua pihak terkait dan pendekatan hubungan “dari atas - ke bawah” dan “dari bawah - ke atas” setara.
- pemenuhan persyaratan terapan.

Tanggung jawab kunci yang lain dari panitia pengarah IRD adalah mengkoordinasi strategi penelitian IRD dan memantau serta melaporkan secara berkala mengenai efektifitasnya.

Menyusun informasi dasar dan menetapkan prioritas penelitian

Diusulkan bahwa untuk proyek penelitian yang datang bisa sangat efektif bila dibangun atas dasar perluasan dan pelajaran positif dari IRD yang sudah berlangsung.

Langkah pertama adalah pemetaan karakteristik seperti sumber alam yang dimiliki, karakter sosial-budaya, kondisi kebijakan dan proses perekonomian begitu pula kesempatan dan kendala yang ada. Keberadaannya mungkin digambarkan sesuai dengan lingkup, sektoral, demografik atau dasar lain. Dalam kasus DAS (entitas spasial) sebagai contoh, pemetaan data yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi DAS dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan situs-situs tersebut yang (i) memerlukan pengelolaan/intervensi investasi yang sangat mendesak, dan (ii) mampu memperoleh kembali potensi dari investasi IRD dalam jangka pendek maupun panjang. Pendekatan serupa dapat diaplikasikan pada basis sektoral untuk mengkaji prioritas antar sector atau basis demografik untuk mengkaji prioritas antar desa atau pusat populasi. Pengkajian awal harus diselesaikan tidak lebih dari satu tahun. Pengkajian ini akan dapat memberikan petunjuk bagi inisiatif investasi IRD dan proyek yang akan datang. Keputusan pertama yang kritis adalah menyetujui keberadaan dan maksud dari basis yang ditetapkan. Hal ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah. Masyarakat dan badan bantuan internasional.

Belajar dari proyek IRD masa lalu dan yang tengah berlangsung

Saat ini sejumlah proyek partisipatif telah terselesaikan maupun yang tengah berlangsung yang memberikan contoh positif dan inovatif dari pada proyek IRD. Hal ini dapat dibangun dan diperluas dikala studi dasar yang garis-garis besarnya tersebut diatas sedang dilakukan. Contoh dari proyek skala DAS ada pada mayoritas pulau di NTT, sebagai contoh: DAS Kambaniru dan Maidang (Sumba Timur); DAS Aesesa (Ngada, Flores); DAS Noelmina (Timor Barat). Contoh proyek yang berbasis sectoral termasuk disini adalah makalah Wanatani oleh Roshetko.

Tak kalah pentingnya, berdasarkan pada pengalaman masa lalu, rancangan dan implementasi dari masing-masing kasus – atau proyek berdasarkan DAS perlu untuk bekerjasama dengan berbagai elemen partisipatori sebagai tersebut.

Persiapan sosial

Sangat perlu untuk persiapan kondisi baik pihak luar (seperti, peneliti, mitra pendana) dan anggota masyarakat untuk mengerakkan partisipasi yang efektif. Hal ini merupakan dasar dalam membangun jaringan sosial, koneksi, dan komunikasi, serta mengurangi hambatan trans-budaya antara penduduk desa dan mitra proyek lainnya.

Tindakan Titik Masuk

Tindakan dan aktivitas diputuskan dalam mode partisipatori antara semua pihak yang memberikan kontribusi, mulai dari pemerintah lokal sampai dengan anggota masyarakat. Titik masuk kunci dari inisiatif atau masalah ini telah teridentifikasi sebagai kebutuhan skala-desa yang sangat penting.

Akibat dari Implementasi yang Signifikan dan Pengelolaan yang dapat diterima

Setelah beberapa waktu, aksi titik masuk mungkin kurang pas atau perlu adanya modifikasi. Memang sangat penting untuk memodifikasi program IRD sesuai keadaan sesaat dengan menggunakan pengelolaan yang dapat diadaptasi.

Serahkan kepada masyarakat sebagai pihak pengontrol

Proses pemberian kuasa agar masyarakat dapat memegang tanggung jawab jangka panjang demi nasib mereka sendiri, sementara pihak peneliti dan peserta lain sedikit demi sedikit keluar dari proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat mampu untuk mengambil tanggung jawab penuh untuk kebutuhan pembangunan mereka sendiri maka dapat diyakinkan bahwa proses PICMA telah mencapai kedewasaan.

Membangun dan mengembangkan kapasitas institusional termasuk kapasistas penelitian yang ada

Tujuan penting dari proyek IRD adalah untuk memperkuat kapasitas individu dan organisasi untuk keuntungan yang berkelanjutan atas proyek IRD. Kapasitas penelitian daerah pada PEMDA NTT dan perguruan tinggi NTT dapat diperkuat melalui jaringan pembangunan lebih lanjut di dalam Indonesia, dan keluar, khususnya kolaborasi dengan institusi Australia mengingat kedekatannya secara geografis. Proses keterlibatan institusi Australia (khususnya bagian utara) akan memberikan keuntungan pada masyarakat regional kedua negara dalam jangka panjang di bidang budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik.

Lembaga-lembaga perguruan tinggi yang di wakili dalam lokakarya telah menghasilkan suatu kerangka kerja strategik jangka panjang, pengembangan ketrampilan dan pengetahuan yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan terpadu (IRD) khususnya di NTT (lihat lampiran 1)

Kerangka waktu dan dana

Strategi ini merupakan pendekatan IRD yang disepakati berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun (kebanyakan negatif). Seperti yang telah disebutkan diatas, informasi dasar perlu dibentuk dalam satu tahun pertama dalam strategi ini, dengan dukungan yang bersamaan untuk mengidentifikasi contoh positif dari IRD. Program strategi yang terus berlangsung akan terbangun dari inisiatif dan melalui konsultasi dengan pemerintah dan badan bantuan.

Kesimpulan

Dalam komentar pembukaan pada empat sesi lokakarya, tertangkap adanya keberhasilan pembangunan desa terpadu dari komentar yang disampaikan oleh Dr. Ferry Karwur 'mentalitas baru lebih penting dari pada penemuan ilmiah atau teknologi baru'. James Adam dan Urbanus Olahurek menggemakan sentimental ini pada makalahnya yang menyarankan perlu adanya perubahan pada tingkah laku masyarakat dan cara berfikirnya. Pola pikir pemerintah dan LSM juga harus dirubah. Pembangunan desa terpadu bukan merupakan pendekatan baru dalam pembangunan, tetapi karena kegagalan masa lalu membuatnya tak lagi mendapat perhatian. Penggerakakan kembali pendekatan IRD diajukan pada peserta lokakarya oleh Djoeroemana, Salean dan Nope berdasar kepada kegagalan dan keberhasilan dari pendekatan yang lalu. Pendekatan mereka melalui mata pencaharian penduduk desa berkelanjutan merupakan kendaraan untuk perubahan pola pikir individu dan organisasi dan cara berfikir tentang pembangunan desa terpadu.

Lokakarya ini mewakili pemecahan pendekatan yang lalu pada pembangunan desa terpadu serta mendefinisikan suatu jalan menuju proyek yang lebih sukses berdasarkan pada pendekatan baru IRD. Pendekatan baru tersebut termasuk didalamnya semua pihak kunci terkait, dinamik dan menerima perubahan pada lingkungan yang lebih luas, menyadari kendala dan pengelolaan yang sesuai, didirikan atas dasar pengetahuan local dan kajian situasi sekarang ini, termasuk membangun kapasitas untuk individu dan organisasi untuk meyakinkan bahwa keuntungan proyek untuk penduduk desa berkelanjutan dan yang paling penting adalah memadukan factor ekonomi, sosial dan budaya, politik dan kebijakan dan lingkungan untuk menyampaikan pembangunan desa terpadu yang berkelanjutan.

Peserta lokakarya mengidentifikasi sebelas kesempatan pembangunan desa terpadu dan sepuluh area yang menjadi kendala IRD di NTT. Sementara banyak perhatian tertuju pada pembangunan pengelolaan DAS karena pengaruhnya, masing-masing kesempatan merupakan komponen penting dalam IRD di Nusa Tenggara Timur. Usulan mengenai strategi penelitian telah disepakati di lokakarya, membangun pendekatan mata pencaharian penduduk desa yang berkelanjutan, menyediakan kerangka kerja untuk memastikan prioritas pembangunan yang lebih spesifik dan membangun proposal proyek dengan berkonsultasi pada pemerintah dan badan bantuan internasional. Usulan mengenai pendekatan Partisipatif Pengelolaan DAS Terpadu (PICMA) ke IRD mungkin aplikasi yang bernilai untuk pengujian akan penampaknya pada pendekatan dengan kelompok masyarakat, badan pemerintah, LSM dan pihak terkait lainnya dan konteksnya dengan teridentifikasi banyaknya kendala yang dihadapi dalam proyek. Sebagai pendekatan yang dinamik dan adaptif, penyaringan dan refisi dapat dibentuk untuk aplikasi pendekatan yang akan datang.

Daftar Pustaka

Russell-Smith J., Hill G., Djoeroemana S. dan Myers B. 2000. Fire and sustainable agricultural development in Eastern Indonesia and Northern Australia. Laporan lokakarya internasional, Darwin, Australia, 13-15 April 1999. Laporan ACIAR No.91 Canberra.

Russell-Smith J., Djoeroemana S., Maan J. and Pandanga P. 2007. Rural livelihoods and burning practices in savanna landscapes of Nusa Tenggara Timur, Eastern Indonesia. *Ekologi Manusia* 35, 345-359.

PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU BERBASIS AGRIBISNIS DI NTT

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MEd

Guru Besar Institute Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Orientasi-pasar baru pada paradigma pembangunan pedesaan telah diajukan demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan di NTT. Pendekatan agribisnis meliputi seluruh nilai mata rantai mulai dari pemasokan bahan, usahatani, transportasi dan pengolahan serta distribusi dan pemasaran. Pendekatan agribisnis disajikan sebagai sistem dengan empat sub-sistem yang berintegrasi; hulu, kegiatan usahatani, hilir dan institusional. Demi bekerjanya agribisnis secara efektif maka subsistem harus saling terkait. Hasil investasi yang baik dalam peningkatan kegiatan usahatani memerlukan adanya gabungan kapasitas dan kinerja dari tiga sub-sistem lainnya. Pada inisiatif pembangunan masa lalu telah mengkonsentrasikan pada sub-sistem usahatani dengan mengharapkan kenaikan pendapatan petani yang ternyata tidak terwujud akibat rendahnya investasi pada sub-sistem yang lain. Makalah ini menafsirkan potensi agribisnis pada usaha-usaha hasil tanaman, perkebunan dan peternakan untuk NTT. Potensi kerjasama telah pula dijelajahi dan menunjukkan perlunya investasi publik pada prasarana utama, khususnya jalan.

Saya diminta oleh Panitia Lokakarya untuk menyampaikan pidato kunci pada lokakarya ini dengan judul "Pembangunan Pedesaan Terintegrasi Berbasis Pertanian di NTT". Pertanian dalam pengertian tradisional terbatas pada pertanian primer dengan orientasi peningkatan produksi. Pengertian dalam arti ini kita adopsi dari pemikiran A.T. Moshier yang kita kenal sebagai pembangunan usahatani yang didukung oleh lima sarat pokok dan lima sarat pelancar.

Untuk meningkatkan pendapatan petani, menambah nilai kepada hasilnya dan memberi orientasi pasar, maka pengertian lama tersebut perlu diubah dengan paradigma baru pembangunan pertanian (as a new way of seeing agriculture) yang kita kenal sebagai pendekatan agribisnis. Perlu saya tegaskan bahwa pendekatan agribisnis bukan sekadar bisnis komoditi pertanian yang sudah lama kita kenal, akan tetapi lebih dari itu, agribisnis merupakan cara baru melihat dan membangun pertanian. Oleh karena itu judul pidato kunci ini saya modifikasi seperti tersebut diatas.

Suatu sistem agribisnis terdiri dari empat subsistem, yaitu: (1) subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness), (2) subsistem agribisnis usahatani (on-farm agribusiness), (3) subsistem agribisnis hilir (downstream agribusiness), dan (4) subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (supporting institution).

Subsistem agribisnis hulu mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas. Dengan demikian, di dalamnya termasuk kegiatan pabrik pupuk, usaha pengadaan bibit unggul, baik untuk tanaman

pangan, tanaman perkebunan, ternak maupun ikan; pabrik pakan untuk ternak dan ikan; pabrik pestisida; serta kegiatan perdagangannya.

Subsistem agribisnis usahatani merupakan kegiatan yang selama ini dikenal sebagai kegiatan usahatani, yaitu kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak dan nelayan, serta dalam arti khusus, termasuk pula kegiatan perhutanan; yang berupaya mengelola input-input (lahan, tenaga kerja, modal teknologi dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian.

Subsistem agribisnis hilir, sering pula disebut sebagai kegiatan agroindustri, adalah kegiatan industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku. Kegiatan pabrik minyak kelapa sawit, industri pengalengan ikan, pabrik tepung tapioka dan banyak kegiatan lain termasuk dalam kelompok subsistem ini. Subsistem perdagangan hasil pertanian atau hasil olahannya merupakan kegiatan terakhir untuk menyampaikan output sistem agribisnis kepada konsumen, baik konsumen di dalam negeri maupun konsumen di luar negeri (ekspor). Kegiatan-kegiatan pengangkutan dan penyimpanan merupakan bagian dari subsistem ini.

Subsistem jasa penunjang (supporting institution) yaitu kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti kebijakan pemerintah, perbankan, penyuluhan, pembiayaan dan lain-lain.

Secara ringkas dapat dinyatakan, sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertical antara beberapa subsistem bisnis dalam satu sistem dalam komoditas. Keempat subsistem tersebut saling terkait dan tergantung satu sama lain. Kemandegan dalam satu subsistem akan mengakibatkan kemandegan subsistem lainnya. Misalnya, kegiatan agroindustri tidak mungkin berkembang tanpa dukungan pengadaan bahan baku dari kegiatan produksi pertanian maupun dukungan sarana perdagangan dan pemasaran.

Dengan paradigma baru (agribisnis) tersebut, maka cara membangun pertanian adalah membangun keempat subsistem agribisnis tersebut mulai dari hulu hingga ke hilir secara simultan dan konsisten. Membangun dan mengembangkan agroindustri (agribisnis hilir) harus seiring dengan pengembangan agribisnis usahatani dan agribisnis hulu. Hal ini berbeda dengan paradigma lama dimana pembangunan pertanian yang kita anut di masa lalu, yang membangun pertanian hanya pada usahatani saja.

Pengembangan agribisnis pada dasarnya bersifat integratif dalam artian pembangunan antar sektor (sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya) dan bahkan antar wilayah di NTT (antar kabupaten dan antar pedesaan disetiap kabupaten). Dengan begitu akan terjadi sinergi antar sektor maupun antar wilayah di NTT, yang pada gilirannya bermuara pada pengembangan agribisnis yang berkelanjutan.

Dari data Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2004/2005 dan Kinerja Perekonomian Nusa Tenggara Timur 2004 nampak sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian NTT. dengan kontribusi kepada PDRB NTT pada tahun 2000 (45,01%), 2001 (43,88%), 2003 (42,87%), dan 2004 (42,46%). Kemudian menyusul

sektor perdagangan hotel, dan restoran, dan sektor jasa-jasa

Selanjutnya bila ditelusuri lebih lanjut nampak pembentukan Nilai Tambah Bruto di sektor pertanian (2000-2004) ternyata didominasi tanaman bahan makanan. Rata-rata kontribusinya kepada pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 51,84% dalam kurun waktu 2000-2004 kemudian menyusul subsektor peternakan sebesar 29,35% dalam kurun waktu 2000-2004, Hal ini memperlihatkan bahwa kedua subsektor ini amat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian di NTT.

Dari segi angkatan kerja data Indikator Ekonomi NTT 2004 memperlihatkan angkatan kerja pada tahun 2000 sebesar 81,39% (yang bekerja 80,21%, mencari pekerjaan 1,72%) dan pada tahun 2004 angkatan kerja sebesar 77,39% (bekerja 73,93%, mencari pekerjaan 3,47%). Selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja di NTT pada tahun 2000 sebesar 81,93% dan pada tahun 2004 sebesar 77,39%.

Data juga memperlihatkan angkatan pekerja yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2000 sebesar 79,35% dan pada tahun 2004 sebesar 73,66%. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Ini memperlihatkan pula bahwa angkatan pekerja yang bekerja di sektor pertanian tersebar di pedesaan-pedesaan di NTT karena kegiatan pertanian justru terdapat di pedesaan-pedesaan.

Dari serangkaian data tersebut diatas nampak bahwa mayoritas (sekitar 80%) penduduk NTT menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian terutama pada subsistem usahatani yang tersebar di pedesaan-pedesaan. Nampaknya subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa layanan pendukung belum berkembang.

Untuk mengembangkan agribisnis pepedesaan di NTT, saya menyarankan agar pada tahap awal bertumpu pada subsektor pertanian tanaman bahan makanan dan subsektor peternakan karena dua subsektor ini yang dominan dalam pembentukan nilai tambah bruto sektor pertanian selama ini. Juga dipertimbangkan subsektor tanaman perkebunan dan kehutanan.

Mengingat pertanian di NTT pada dasarnya adalah pertanian lahan kering, dari subsektor pertanian tanaman bahan makanan yang potensial untuk dikembangkan melalui pendekatan agribisnis adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Data memperlihatkan bahwa produksi jagung pipilan kering pada tahun 2004 mencapai 622.812 ton dari areal seluas 264.907 hektar yang meningkat bila di banding dengan produksi tahun 2003 yang hanya 583.355 ton dari 257.742 hektar. Produksi ubi kayu pada tahun 2004 produksinya 1.041.280 ton meningkat dari tahun sebelumnya (2003) yang hanya 861.620 ton. Ubi jalar pada tahun 2004 produksinya 126.406 ton yang meningkat dari tahun sebelumnya (2003) yang hanya 86.692 ton. Kacang tanah pada tahun 2004 produksinya 17.680 ton yang meningkat dari tahun sebelumnya (2003) yang hanya 13.637 ton.

Kendatipun tanaman perkebunan tidak menonjol dalam pembentukan Nilai Tambah

Bruto namun ada sejumlah tanaman perkebunan yang patut dikembangkan melalui pendekatan agribisnis yaitu kopi, kelapa, coklat, kemiri, dan jambu mente. Perkembangan produksi tanaman-tanaman ini cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Juga hasil-hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dapat dikembangkan melalui pendekatan agribisnis, seperti kutu lak di Sumba.

Dari segi ternak, jenis-jenis ternak yang dapat dikembangkan melalui pendekatan agribisnis adalah sapi, babi, kambing, domba, dan ayam kampung. Ternak sapi pada tahun 2004 berjumlah 522.929 ekor yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Timur Dan Kabupaten Ngada. Babi pada tahun 2004 berjumlah 1.276.164 ekor dimana jumlah terbesar terdapat di Kabupaten TTS, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Sikka. Ayam kampung pada tahun 2004 berjumlah 9.389.209 ekor dimana jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Rote Ndao.

Selama ini pembangunan pertanian di NTT, terutama terfokus pada agribisnis usahatani saja yang memang dapat meningkatkan produksi tetapi sangat sulit meningkatkan pendapatan petani secara riil dan meningkatkan serta menahan nilai tambah yang lebih besar di wilayah pusat produksi pertanian. Penyebabnya adalah karena pada agribisnis usahatani nilai tambah yang tercipta adalah sangat kecil dan jauh lebih kecil dari pada nilai tambah yang tercipta pada agribisnis hulu dan pada agribisnis hilir (industri pengolahan dan perdagangan). Oleh karena itu, pembangunan pertanian di NTT perlu di ubah dari konsep pertanian primer ke konsep agribisnis.

Dalam rangka pengembangan agribisnis di NTT, perlu diupayakan agar di wilayah ini di kembangkan usaha-usaha pembibitan komoditi unggul yang dapat memenuhi kebutuhan bibit para petani. Disamping itu yang paling penting adalah mengembangkan industri hasil pengolahan hasil pertanian yang bahan bakunya ada di NTT. Kita perlu mengembangkan industri yang bahan bakunya dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kopi, kelapa, coklat, kemiri, jambu mente dan hasil-hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dengan pengembangan agribisnis industri yang demikian ini di NTT, maka nilai tambah agribisnis yang tertahan di wilayah NTT akan lebih besar.

Kemudian untuk meningkatkan pendapatan para petani dan sekaligus memperluas jaringan bisnis petani, perlu didorong berkembangnya organisasi bisnis terutama koperasi agribisnis dikalangan petani di NTT. Koperasi agribisnis yang dimaksudkan disini bukanlah konsep KUD masa lalu yang menangani segala macam komoditas dan hanya bergerak pada pertanian primer saja. Koperasi agribisnis yang dimaksudkan adalah koperasi yang menangani satu jenis komoditi mulai dari hulu hingga ke hilir. Melalui koperasi agribisnis ini, petani dapat mengembangkan jaringan bisnisnya, baik pada agribisnis hulu maupun pada agribisnis hilir (industri pengolahan, perdagangan). Dengan demikian, nilai tambah yang tercipta dalam agribisnis suatu komoditas dapat dinikmati oleh para petani sedemikian rupa sehingga pendapatan mereka dapat meningkat lebih cepat. Hal ini akan meningkatkan gairah dan kebanggaan para petani serta akan merangsang tumbuhnya generasi baru pengusaha agribisnis dari keluarga petani.

Pengembangan agroindustri dan organisasi bisnis petani tersebut perlu disertai dengan subsistem jasa agribisnis terutama pengembangan prasarana jalan. Pengembangan prasarana jalan perlu mendapat prioritas dari PEMDA NTT karena masih banyak pedesaan di NTT yang belum terjangkau kendaraan roda empat, padahal potensi pengembangan agribisnis cukup besar. Pengembangan jaringan jalan ini akan mendorong pengembangan agribisnis baru dan meningkatkan efisiensi pengangkutan komoditas pertanian di NTT.

Bila pengembangan agribisnis berhasil kita wujudkan di NTT, maka NTT akan siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang di masa yang akan datang.

Berkembangnya agribisnis di NTT akan menarik kegiatan petani lainnya, baik yang menyediakan bahan-bahan penolong dan jasa yang dibutuhkan oleh agribisnis, maupun sektor informal. Hal ini akan menarik aliran modal dan sumberdaya manusia ke NTT. Dengan demikian, pengembangan agribisnis akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan integrasi antar sektor di NTT untuk membiayai sendiri (self-financing) pembangunan, sehingga siap melaksanakan otonomi daerah secara penuh.

Kemudian karena produk-produk yang di hasilkan agribisnis yang dihasilkan di NTT adalah produk yang bersifat memiliki elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi, maka meningkatnya pendapatan masyarakat di wilayah perkotaan akan menarik lebih lanjut berkembangnya agribisnis di NTT. Dengan demikian, pengembangan agribisnis dapat mengintegrasikan perekonomian pedesaan dengan perkotaan, perekonomian NTT dengan perekonomian Nasional.

Selanjutnya, karena komoditas yang dihasilkan agribisnis NTT juga dibutuhkan di kawasan internasional, maka manfaat ekonomi yang timbul dari liberalisasi ekonomi dunia dan integrasi ekonomi (khususnya AFTA dan APEC) pada abad ke-21 ini, dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di NTT.

Pengembangan agribisnis yang bertumpu pada aset-aset di pedesaan-pedesaan akan membuka peluang timbul dan berkembangnya pembangunan pedesaan yang terintegrasi. Berbagai kegiatan usaha mikro-kecil-menengah dan industri pengelolaan dan industri rumah tangga serta berbagai kegiatan lainnya akan muncul dan berkembang di pedesaan yang pada gilirannya menggulirkan pembangunan pedesaan terintegrasi berbasis agribisnis di NTT.

Selanjutnya dengan timbulnya liberalisasi ekonomi dunia dan integrasi ekonomi pada abad 21 ini, maka perlu di kembangkan jaringan kerja sama international dengan berbagai komunitas international. Dengan begitu NTT membuka diri bagi kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai komunitas internasional.

Daftar Pustaka

Mosher A.T. 1966. Getting agriculture moving. Frederick Praeger: New York.

TINJAUAN UMUM ASPEK-ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI, DAN POLITIK PEMBANGUNAN PEDESAAN NTT

Siliwoloe Djoeroemana,¹ E.Th. Salean², W. Nope³

¹. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana Sumba

². Kepala BAPPEDA Nusa Tenggara Timur

³. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Nusa Tenggara Timur

Email: siliwoloe2005@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan pedesaan terpadu dimulai pada awal tahun 1970 untuk menjawab ketertinggalan, kebodohan maupun kemiskinan pedesaan, sekaligus menciptakan wilayah dan penduduk pedesaan yang modern dan maju. Untuk itu ditempuh pendekatan perencanaan terpusat dengan tujuan agar keterpaduan berbagai sektor dapat dicapai. Namun setelah 35 tahun pembangunan pedesaan dilancarkan tingkat kemiskinan di NTT masih saja nampak, bahkan data tahun 2005 memperlihatkan tingkat kemiskinan rumah tangga sebesar 58% rumah tangga miskin.

Diperlukan pendekatan alternatif yang disebut penghidupan masyarakat pedesaan yang berkelanjutan dalam konteks Ekologi, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Politik. Faktor-faktor dalam konteks ekologi terdiri dari pengelolaan api, penghutanan kembali/reboisasi dan sumber air. Faktor-faktor dalam konteks sosial budaya terdiri dari kepemilikan tanah, modal sosial, kearifan sosial, dan pendidikan. Faktor-faktor dalam konteks ekonomi terdiri dari usaha kecil-menengah, lembaga kredit mikro, dan koperasi. Faktor-faktor dalam konteks politik terdiri dari kepemimpinan pedesaan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan sektoral. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan Pengembangan Penghidupan Pedesaan yang Berkelanjutan Terpadu.

Pendekatan ini memberi peluang kepada masyarakat pedesaan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok untuk memperkuat kemampuannya bagi pengembangan aset yang ia miliki dan dinamika yang ada menjadi mampu ditransformasikan dalam rangka Pengembangan Penghidupan Pedesaan yang Berkelanjutan Terpadu.

Berbagai program pembangunan pedesaan, baik sektoral maupun spasial mengalir ke-pedesaan dengan dipimpin oleh negara (State Led Development). Pada awal tahun 1970-an, negara yang didukung oleh Bank Dunia maupun pendukung developmentalisme, menerapkan pembangunan pedesaan terpadu (Integrated Rural Development-IRD) untuk menjawab ketertinggalan, kebodohan maupun kemiskinan pedesaan, sekaligus menciptakan wilayah dan penduduk pedesaan yang modern dan maju, sebagaimana dirumuskan oleh Bank Dunia, IRD mengambil strategi pertumbuhan dan berbasis-wilayah, terutama wilayah pedesaan. Program IRD secara tipikal menekankan peningkatan produktivitas pertanian sebagai basis pendapatan orang pedesaan, sekaligus mengedepankan kontribusi yang terintegrasi (sinergis) pendidikan, kesehatan, pelayanan

sosial, pelatihan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Program IRD di tempuh melalui pendekatan perencanaan terpusat (*central planning*) dengan tujuan agar keterpaduan berbagai sektor dapat tercapai. Berbagai bantuan diberikan kepada pedesaan oleh pemerintah, seperti Inpres Bantuan Pedesaan, Inpres Daerah, Inpres SD, Inpres Kesehatan, Inpres Jalan, Reboisasi, IDT dan lain-lain lagi.

Namun setelah 35 tahun pembangunan pedesaan dilancarkan, tingkat kemiskinan di NTT masih saja nampak yang diperlihatkan oleh presentase yang naik turun dari tahun ke tahun. Data terakhir tingkat kemiskinan di NTT sekitar 58% rumah tangga miskin atau 60% penduduk miskin dan pada 17 Januari 2006 rumah tangga miskin melonjak menjadi sekitar 75% atau 78% penduduk miskin (BPS NTT 2005 dan 2006, PDE Propinsi NTT 2005). Dari 60% penduduk miskin tersebut di atas, sekitar 56% bermukim di pedesaan. Terlepas dari akurat tidaknya data tersebut, yang terpenting adalah kemiskinan masih nampak di pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan pedesaan terpadu selama ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Persoalan yang menggelitik adalah mengapa hal tersebut masih terjadi di pedesaan? Berikut ini akan dibahas dalam koridor lingkungan fisik, sosial-budaya, ekonomi, dan politik dalam pembangunan pedesaan terpadu selama ini. Pembahasannya akan lebih terpusat pada masalah-masalah dalam lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi dan politik.

Dari aspek lingkungan fisik. Secara umum luas wilayah Darat NTT 4.734.991 Ha, yang terdiri dari datar 0-2% 459.059 Ha, bergelombang 2-15% 794.505 Ha, Curam 15-40% 1.802.479 Ha, Sangat curam >40% 1.678.948 Ha. Iklim suhu 29.96 °c, kelembaban udara 76.25%, curah hujan 117.13 mm/th, dan kecepatan angin 5.00 knot (BAPPEDA NTT 2005).

Lahan yang bisa digunakan untuk pertanian hanya seluas sekitar 64% dari luas daratan, curah hujan yang rendah (117.13 mm/th) dengan musim hujan rata-rata 4 bulan/th. Selain itu kebakaran hutan dan padang rumput yang terjadi setiap tahun mulai bulan Juli-Oktober dan keterbatasan sumber air (BAPPEDA NTT 2005). Keterbatasan seperti ini menyebabkan kegiatan pertanian sebagai sumber pokok penghidupan masyarakat tidak optimal.

Dari segi Sosial-Budaya. Secara umum jumlah penduduk 4.188.774 (laki-laki 2.088.156 dan perempuan 2.100.618) dengan kepadatan penduduk 88 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%.

Kepemilikan tanah yang belum memberikan kepastian hak milik atas tanah di kalangan penduduk pedesaan. Selain itu sering terjadi konflik kepemilikan tanah antar warga masyarakat dan antar warga masyarakat dengan pemerintah, bahkan tanah menjadi komoditas yang diperjual belikan antara orang-orang dari kota dan orang-orang di pedesaan. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan kegiatan pertanian di pedesaan tidak bisa optimal.

Masih dalam aspek sosial budaya yang menyangkut modal sosial. Inti modal sosial adalah terletak pada kelompok-kelompok organisasi-organisasi sosial yang membangun

kepercayaan, solidaritas, resiprositas lintas kelompok dan organisasi (Lin *et al.* 2001; Sutoro 2005). Dengan begitu, menurut Colleta, dkk. (Sutoro 2005) modal sosial berfungsi sebagai jembatan sosial untuk mengelola konflik. Selain itu modal sosial dapat menjadi media interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, kemitraan, responsivitas dan partisipasi (Sutoro 2005). Masalahnya adalah pemanfaatan modal sosial belum optimal. Kelompok-kelompok organisasi sosial maupun pemerintah masih berjalan sendiri-sendiri dalam pembangunan pedesaan.

Masih dalam aspek sosial budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal yang tercermin dalam adaptasi ekologis, kepemimpinan dan demokrasi sosial, ekonomi moral dan kesalehan social (Sutoro 2005). Ekspansi pasar ke pedesaan memaksa orang pedesaan untuk meninggalkan kearifan adaptasi ekologis yang telah dimilikinya turun-temurun. Demikian pula semangat kepemimpinan yang mengagungkan keteladanan dan mengedepankan semangat demokrasi sosial telah mengalami erosi. Kemudian ekonomi moral yang tercermin dalam sistem produksi, distribusi dan konsumsi telah mulai luntur. Sistem produksi dimana orang pedesaan sangat memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan warganya sudah mulai luntur dengan adanya ekspansi pasar.

Demikian pula kearifan lokal segi distribusi dalam bentuk resiprositas dan redistribusi telah mulai luntur. Tradisi keagamaan yang mengutamakan kesalehan juga mulai luntur dengan adanya ekspansi pasar. Masih dalam aspek sosial budaya adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Mayoritas tingkat pendidikan angkatan kerja adalah SD (sekitar 38%) dan bahkan ada yang tidak pernah mengenyam sekolah (sekitar 39%), (BAPPEDA NTT, 2006).

Dari segi Ekonomi. Struktur perekonomian NTT lebih didominasi oleh sektor pertanian yang pada tahun 2004 kontribusinya terhadap PDRB sebesar 42.46%; pendapatan perkapita pada tahun 2003 sebesar 2.248.333 lebih tinggi dari tahun sebelumnya (BPS NTT 2004). Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 (4,73%) meningkat pada tahun 2002 menjadi 4,88%, kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 4,57% pada tahun 2003 dan meningkat lagi menjadi 5,58% pada tahun 2004 (BPS-NTT 2004). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi sektor-sektor ekonomi yang ada di NTT telah kembali meningkat. Kondisi tersebut pada gilirannya telah ikut mendorong peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku bagi penduduk NTT dari sekitar 2,3 juta rupiah pada tahun 2001 menjadi sekitar 3,1 juta rupiah pada tahun 2004 (BPS NTT 2004).

Dengan bertumpu pada pertanian ada tiga soko guru ekonomi pedesaan (Sutoro 2005; Dinas Koperasi NTT 2005) yaitu, Usaha Kecil-Menengah (UKM), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi. UKM yang mulai tumbuh di pedesaan mengalami pasang surut, ada yang berkembang namun juga tidak sedikit yang gulung tikar. LKM belum cukup besar jumlahnya dan penyebarannya untuk menopang ekonomi pedesaan. Demikian pula koperasi juga belum memperlihatkan kinerja yang mampu menopang ekonomi pedesaan (Saragih 2001, Sutoro 2005).

Dari segi Politik. NTT terdiri dari 15 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di Flores, Timur-Barat, Sumba, Lembata, Alor Dan Rote dengan jumlah kecamatan 197, kelurahan 292 dan pedesaan 2414, (BAPPEDA-NTT 2006).

Kepemimpinan di pedesaan NTT masih diwarnai dualisme kepemimpinan yaitu kepemimpinan formal, kepala pedesaan dan kepemimpinan kesatuan masyarakat adat, tokoh/pemimpin adat (Djoeroemana 2004). Hal ini menyebabkan adanya dualisme kesetiaan dan ketaatan di kalangan masyarakat pedesaan. Konsekuensi selanjutnya adalah kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Hal ini juga memberi peluang adanya dualisme forum pengambilan keputusan dalam pembangunan pedesaan. Juga kehadiran dinas-dinas sektoral dalam pembangunan pedesaan secara sendiri-sendiri mengganggu keterpaduan pembangunan pedesaan.

Masalah-masalah tersebut diatas dalam aspek-aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan politik secara bersama-sama mempengaruhi jalannya pembangunan pedesaan terpadu yang bermuara pada masih terjadinya tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan masih rendah. Selain itu pendekatan pembangunan pedesaan terpadu yang bersifat sentralistik mengurangi kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan pedesaan.

Pembangunan pedesaan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial yang dirancang sangat teknokratik dan sentralistik mengabaikan aspek keberlanjutan, konteks dan kebutuhan lokal, partisipasi, penguatan kapasitas lokal (Sutoro 2005, Djoeroemana 2005). Pendekatan pembangunan pedesaan seperti ini berpumpun pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berbasis wilayah. Di sini nampak bahwa aktor utama dalam pembangunan pedesaan adalah negara dan pasar. Ini mengabaikan aktor masyarakat sebab masyarakat sebagai target penerima manfaat, bukan subyek yang harus dihormati dan memegang posisi kunci pembangunan secara partisipatif.

Pumpun pertumbuhan ekonomi didasarkan pada teori modernisasi (developmentalism), suatu aliran pembangunan yang berbicara pada persoalan bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup manusia (Sutoro 2005). Perbaikan tingkat hidup itu tercermin di dalam indikator ekonomi murni, yaitu kenaikan pendapatan atau pendapatan perkapita secara nyata dan kumulatif.

Mengacu kepada apa yang dipaparkan di atas dipandang perlu untuk memperkenalkan suatu pendekatan alternatif dalam pembangunan pedesaan yang lebih menekankan kekuatan masyarakat. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan penghidupan masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.

Pendekatan masyarakat pedesaan yang berkelanjutan memahami penghidupan masyarakat pedesaan dari kondisi yang rentan menjadi berkelanjutan dengan mengembangkan aset yang ia miliki dan dinamika yang ada menjadi mampu ditransformasikan. Penghidupan masyarakat adalah suatu kemampuan daya hidup yang dimiliki baik itu secara material dan sosial, yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ini melihat kompleksitas aset individu dan komunitas di pedesaan dan bagaimana dinamika terjadi dalam proses transformasi.

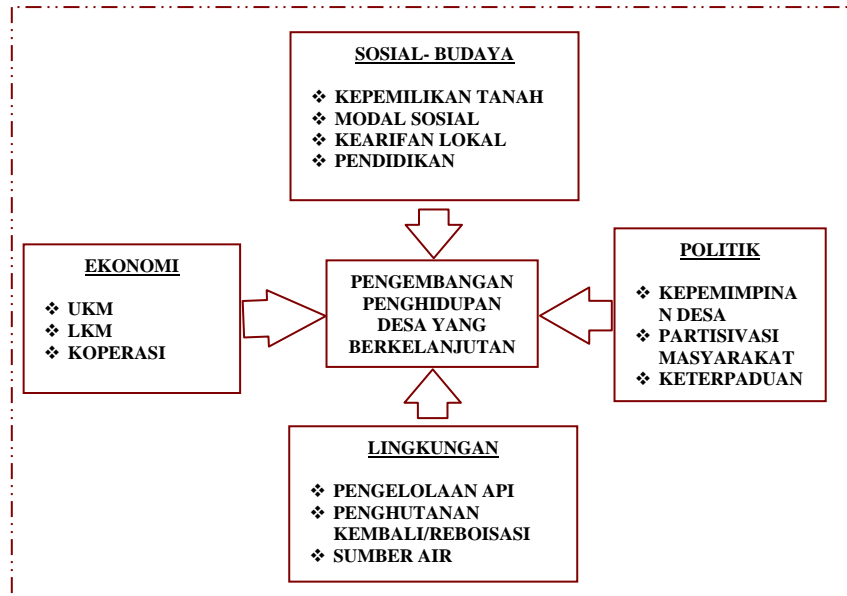
Bisa terjadi satu individu atau kelompok masyarakat merespon lebih cepat dibanding yang lain, oleh karena itu keberagaman kegiatan yang berbasis pada penguatan masing-masing karakter menjadi penting. Sebab itu pendampingan dilakukan dengan membangun kekuatan individu dan kelompok untuk mengembangkan potensinya, dan dengan begitu mampu mengatasi masalahnya sendiri dan mengembangkannya untuk mencapai tujuan. Penghidupan yang berkelanjutan bertumpu pada transformasi masyarakat dengan memperkuat kemampuan masyarakat agar aset kehidupannya dapat ditransformasikan olehnya.

Konsep dasar pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (Sutoro 2005) adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai pusat semua kegiatan pembangunan (people-centered). Menempatkan masyarakat sebagai pusat kepentingan, berarti semua pemahaman, analisis dan proses perencanaan dan perubahan berangkat dari masyarakat sendiri.
2. Pendekatan menyeluruh berangkat dari pemahaman dan kepentingan masyarakat. Berbagai faktor hambatan dan peluang perlu dipahami dalam konteks pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar dapat dikembangkan nanti solusi maupun pengembangan oleh masyarakat pula.
3. Mengingat bahwa kehidupan itu dinamis, maka kita hanya dapat memotret sesaat keadaan yang terjadi (dynamic). Oleh karena itu pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) dipandang perlu diikuti prosesnya dan perubahan yang terjadi, sehingga penting untuk dikembangkan proses monitoring dan pembelajaran oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan tersebut.
4. Pendekatan ini lebih melihat bagaimana kekuatan dapat di bangun daripada menganalisis kebutuhan (building on strength). Kekuatan yang dibangun berarti pengakuan pada kemampuan masing-masing orang untuk berkembang dengan memperkuat jaringan sosial agar mampu secara individu maupun kolektif mengatasi permasalahan, menghilangkan kendala dan membangun potensi untuk mencapai tujuan.
5. Adanya keterkaitan makro dan mikro dalam proses perubahan dan pengembangan (macro-micro link). Pendekatan ini berupaya untuk menjembatani jurang teori dan praktek maupun kebijakan makro dan kebijakan mikro. Disini diperlukan pemahaman oleh individu dan komunitas mengenai apa yang terjadi dalam konteks makro yang mempengaruhi kehidupannya. Demikian pula mereka yang mempengaruhi lingkungan makro, seperti para pengambil keputusan, penting bagi mereka memahami isu-isu dan peristiwa-peristiwa pada tingkat komunitas.
6. Pendekatan ini memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan suatu proses dan hasil dalam suatu siklus yang diharapkan tidak terputus atau mengalami goncangan yang menyebabkan terjadi keruntuhan atau kemunduran. Proses dan hasil yang diharapkan adalah melakukan transformasi dari kondisi yang rentan menuju peningkatan yang berkelanjutan (sustainable).

Untuk melaksanakan pengembangan penghidupan pedesaan yang berkelanjutan terpadu diperlukan suatu model dalam konteks komponen-komponen lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan politik (Gambar 1). Pada komponen lingkungan perlu dilakukan pengelolaan api, penghutanan kembali/reboisasi, dan penambahan sumber air. Pada komponen sosial budaya perlu dilakukan penataan kepemilikan tanah, pemanfaatan modal sosial, revitalisasi kearifan lokal, pemerataan dan peningkatan pendidikan. Pada komponen ekonomi perlu dilakukan peningkatan Usaha Kecil-Menengah (UKM) berbasis pertanian, peningkatan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan peningkatan jumlah dan kegiatan koperasi. Pada komponen politik perlu dihilangkan dualisme kepemimpinan pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dan meningkatkan sinergi antar dinas-dinas sektoral dalam pembangunan pedesaan sehingga memperlihatkan keterpaduan yang dinamis.

Keterpaduan keempat komponen tadi akan memungkinkan pelaksanaan pengembangan penghidupan pedesaan yang berkelanjutan terpadu yang bertumpu pada manusia baik sebagai individu maupun kelompok seperti diperlihatkan pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1. Pengembangan penghidupan pedesaan yang berkelanjutan terpadu

Daftar Pustaka

- BAPPEDA NTT (2006). Kondisi obyektif Nusa Tenggara Timur, Pemda NTT, Kupang.
 BAPPEDA NTT (2005). Profil Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemda NTT, Kupang
 BAPPEDA NTT (2005), Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, Kantor BPS, NTT, Kupang.
 BPS Propinsi NTT (2004). Indikator Ekonomi, Nusa Tenggara Timur, Kantor BPS, NTT, Kupang.
 BPS Propinsi NTT(2004). Kinerja Perekonomian Nusa Tenggara Timur, Kantor BPS, NTT, Kupang.
 BPS Propinsi NTT(2004). Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur

Dinas Koperasi Propinsi NTT (2005). Laporan Tahunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Koperasi NTT

Djoeroemana, Siliwoloe (2004). Pola Kepemimpinan Pedesaan di Sumba (Makalah Penelitian yang tidak diterbitkan), STIE Wira Wacana Sumba, Waingapu.

Djoeroemana, Siliwoloe, (2005). Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan (Makalah tidak diterbitkan), STIE Wira Wacana Sumba, Waingapu.

Lin Nan, Karen Cocok, Ronal S. Burk (2001). Social Capital, Aldine de Gruiter, New York 10532

Saragih, Bungaran, (2001) Agribisnis: Paradigma Baru dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT Surveyor Indonesia, Jakarta

Sutoro Eko, (2005), Manifesto Pembaharuan Pedesaan, APMD Pres, Yogyakarta

PENGALAMAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT SUB DAS AEMAU-DAS AESESA, NGADA FLORES

Ir. Josef Maan¹ dan Ir. Paskalis Nai²

1. Koordinator Yayasan Mitra Tani Mandiri di Ngada, Flores
2. Koordinator Studio Driya Media Kupang

ABSTRAK

Inovasi pendekatan terhadap pengelolaan berbasis DAS dan pembangunan yang telah terimplementasi sejak tahun 1997 di dataran tinggi Aesesa, Ngada (Flores Tengah). Makalah ini mendeskripsikan tiga pendekatan utama yang di jalankan hingga saat ini, termasuk pengembangan partisipatori, kerjasama berbasis kemasyarakatan yang melibatkan penduduk setempat, Pemerintah setempat, dan sector LSM. Di tahun belakangan ini, program yang diselenggarakan berfokus pada pembangunan kapasitas masyarakat di Aemau sub-dataran tinggi, melalui perencanaan berbasis kemasyarakatan, pembangunan wana tani berkelanjutan dan usaha pertanian serta yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, pengembangan fasilitas kredit yang dapat terjangkau, dan pembangunan institusi pemerintahan setempat.

1. Pengantar

Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1997, dengan visi mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat laki-laki dan perempuan di pedesaan dan daerah marginal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan semangat kemitraan.

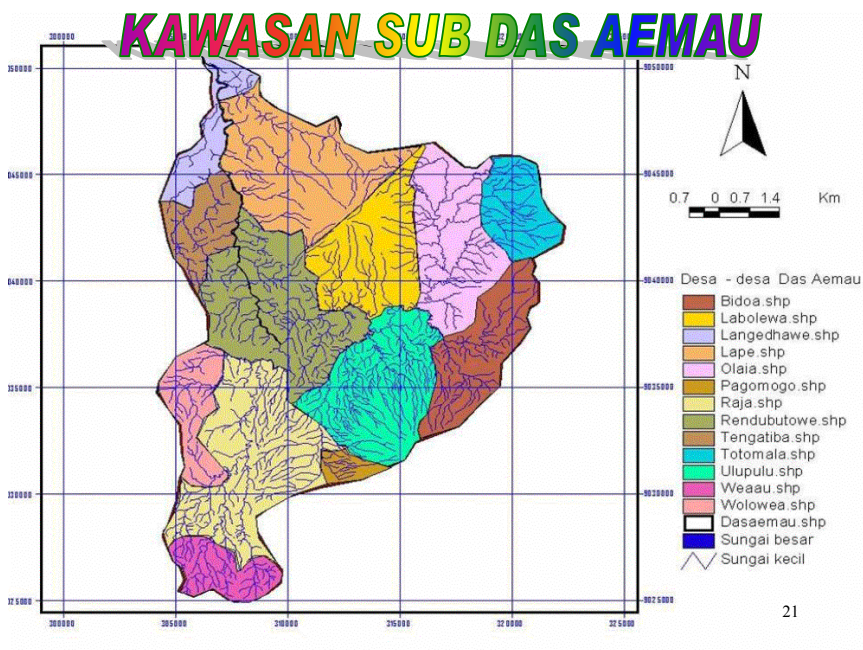
Sedangkan Studio Driya Media Kupang (SDM K) adalah sebuah lembaga yang memperjuangkan visi terwujudnya pelembagaan pendekatan partisipatif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berhasil guna, terselenggara terus menerus dan dinikmati secara merata sebagai prasyarat menuju masyarakat yang terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara, sejahtera dalam tatanan yang berkeadilan. Lembaga ini didirikan tahun 1995 untuk mendukung upaya-upaya sharing dan pembelajaran multipihak dalam bidang pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan media tepat guna. Dalam pengembangan programnya SDM Kupang mendukung jaringan multipihak yang ada di Nusa Tenggara.

YMTM Ngada dan SDM Kupang adalah partisipan Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT) yang selama ini sangat peduli dengan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Ada berbagai strategi dan pendekatan

pemberdayaan yang telah difasilitasi oleh YMTM Ngada dan SDM Kupang dengan dukungan KPMNT.

YMTM sejak tahun 1997, mendampingi masyarakat di Daerah Aliran sungai (DAS) Aesesa. DAS Aesesa menjadi fokus karena merupakan DAS terbesar kedua di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah Noelmina-Benenain dan terkering di wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan curah hujan rata-rata 3-4 bulan. DAS Aesesa terletak di Kabupaten Ngada, Flores NTT. DAS Aesesa bagi masyarakat Kabupaten Ngada merupakan sumber air utama bagi pengairan persawahan di Mbay, dimana Mbay adalah sebagai salah satu lumbung beras di Kabupaten Ngada dan kabupaten lainnya di Flores. DAS Aesesa terbagi atas 5 sub DAS dan salah satu bagian sub DAS terkering dan tersebar adalah sub DAS Aemau.

Sub DAS Aemau meliputi 15 desa yang tersebar di wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Aesesa 9 desa, Kecamatan Boawae 3 desa dan Kecamatan Nangaroro 3 desa. Jumlah penduduk sebanyak 3,996 keluarga atau 21,002 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9,839 orang dan perempuan 11,163 orang (*Ngada dalam angka 2002*).



Sekitar 70% luas lahan sub DAS Aemau bervegetasi padang rumput yang gersang, kritis, dengan berbagai permasalahan lainnya yang cukup kompleks. Vegetasi pohon hanya terdapat di sekitar aliran air atau tempat-tempat tertentu. Kondisi tanah bercadas, kritis, kering, dengan solum tanah sangat tipis, dan semakin menipis apalagi didukung oleh tingkat erosi tanah yang tinggi dengan kemiringan lahan berkisar 30-40%, dan kebakaran padang yang terjadi setiap tahunnya, serta ternak lepas. Sumber air bersih bagi masyarakat sangat terbatas, dan umumnya terletak di daerah yang lebih rendah dari pemukiman. Tingkat pendidikan penduduk rata-rata sekolah dasar. Mata pencaharian 98% merupakan petani, 2% lainnya merupakan guru, pedagang dan pekerjaan lainnya. Sistem usahatani yang dikembangkan masih bersifat tradisional yaitu berpindah-pindah

dengan orientasi jangka pendek atau subsiten. Masyarakat bergabung dalam suku-suku dan suku yang paling besar adalah suku Rendu yang meliputi 5 desa.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas dalam pengelolaan DAS maka YMTM Ngada sejak tahun 1997 telah mengembangkan beberapa kegiatan program yang terintegrasi satu sama lain dengan beberapa strategi pendekatan program yang mempunyai kelemahan dan kelebihan.

2. Program

Program yang dikembangkan bersama masyarakat di Sub DAS Aemau DAS Aesesa yaitu:

- Pertanian berkelanjutan/Agroforestry meliputi:
 - ▶ Konservasi tanah (pengembangan: terasering, olah lubang, pupuk cair, pembenaman bahan organik, kompos dan pesetisida organik),
 - ▶ Pengembangan tanaman umur panjang (kehutanan, perkebunan, hortikultura),
 - ▶ Penanaman sayur-sayuran, persiapan lahan penanaman sampai dengan pasca panen
 - ▶ Usaha ternak sapi penggemukan/paron dan pengembangbiakan.
- Pengembangan usaha ekonomis: usaha bersama simpan pinjam/UBSP (pelatihan dan pendampingan pembukuan keuangan, administrasi dan kelembagaan), usaha industri rumah tangga (instan jahe, sirup mengkudu, instan alang-alang, instan wortel, kacang mente), pemasaran komoditi (jambu mente dan kemiri)
- Penguatan institusi kelompok tani, UBSP, koperasi dan Forum Petani (pelatihan dan pengembangan manajemen organisasi, keuangan, advokasi, lobby kepada stakeholders)
- Advokasi kebijakan (mengontrol pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pemdes dan pemda, dan memfasilitasi pembuatan perdes)
- Penguatan pemerintah desa fasilitasi pembuatan perdes partisipatif, APBDes partisipatif, dan Renstra Desa.
- Fasilitasi kajian-kajian partisipatif (tanah, suku, GIS, pengelolaan kebakaran)

3. Pendekatan Program

1. Pendekatan Perorangan/Kebun (1997-1999)

Pendekatan perorangan/kebun: staf lapangan melakukan pendekatan orang-perorang atau dari kebun ke kebun, menjelaskan tujuan dan manfaat program, latihan, diskusi bersama anggota keluarga, praktek dan pendampingan lanjutan. Pendekatan ini sangat efektif karena petani langsung mengerti, tujuan, manfaat sehingga langsung menerapkannya di kebunnya. Jika petani kurang mengerti bisa langsung berdiskusi dengan pendamping. Hasilnya rata-rata kebun-kebun petani tersebut sangat mencerminkan **penerapan pertanian berkelanjutan** dan petani-petani yang ada pada umumnya menjadi **petani penggerak atau motivator program** bagi orang lain. Contoh model pertanian berkelanjutan 3-8 kebun per desa yang tersebar di 17 desa dampingan. Sedangkan petani

penggerak yang YMTM miliki hingga saat ini sebanyak 30 orang, dimana sebagian besar telah menduduki jabatan di pemerintah desa, BPD dan LKMD.

Akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah membutuhkan tenaga, waktu dan biaya cukup tinggi, serta perkembangan dampak program sangat lamban. Di lain pihak tenaga, dan biaya sangat terbatas padahal tuntutan penyebaran program dari masyarakat sangat tinggi.

2. Pendekatan Kelompok (1999-2003)

Dalam penerapan pendekatan kelompok, YMTM tidak membentuk kelompok baru namun memperbaharui kelompok-kelompok yang sudah ada di desa seperti kelompok *Woe, hamparan*, kelompok rukun tetangga/RT, kelompok inpres desa tertinggal (IDT) dan kelompok-kelompok lainnya. Peran YMTM adalah memperkuat kelompok-kelompok yang sudah ada, dengan pelatihan dan pendampingan. Materi pelatihan yang diberikan antara lain: dinamika kelompok, pembukuan dan administrasi keuangan, aturan-aturan dan sanksi/anggaran dasar-anggaran rumah tangga (AD/ART), perencanaan dan monitoring evaluasi, kepemimpinan, kerjasama, analisa usaha, pendidikan hukum kritis, dan beberapa materi lainnya.

Selain itu untuk memperkuat keberadaan kelompok maka kelompok difasilitasi untuk membentuk UBSP. Dalam wadah ini petani dapat meminjam jika membutuhkan dana untuk mendukung usaha dan menyimpan jika kelebihan uang. Setiap bulan selalu ada pertemuan rutin untuk transaksi simpan dan pinjam. Pada pertemuan rutin bulanan selain kegiatan simpan pinjam juga untuk mengevaluasi kegiatan, membuat rencana dan membahas permasalahan lain dalam kelompok serta dilakukan pendampingan dan pelatihan apabila diperlukan. Dengan adanya pertemuan rutin, pelatihan dan pendampingan secara rutin kelompok dapat menjadi lebih mandiri.

Untuk mendukung UBSP, dalam hal ini kelancaran simpan pinjam uang tunai dalam kelompok maka YMTM memfasilitasi pengembangan usaha-usaha yang bersifat ekonomis antara lain: pembuatan instan jahe, instan alang-alang, instan wortel, sirup mengkudu, kacang mente, pengembangan ternak sapi dan pengembangan sayuran. Dari kegiatan-kegiatan ini ditambah dengan *usaha catut* dan tenun ikat yang dikembangkan secara sendiri oleh petani, petani dapat memperoleh uang tunai secara rutin sehingga dapat mendukung transaksi simpan dan pinjam di kelompok UBSP setiap bulannya.

Keluaran atau hasil yang dicapai dengan adanya pendekatan ini kelompok menjamin mandiri dalam organisasi, usaha dan modal. Kelompok tani yang didampingi sebanyak 125 kelompok dan dari jumlah tersebut 60,8% atau 76 kelompok dapat digolongkan dalam kelompok yang mandiri dalam arti dapat melanjutkan sendiri kegiatan kelompoknya tanpa pendampingan. Rata-rata modal yang mereka miliki Rp.2 juta – Rp. 4 juta untuk kelompok tani dan Rp.6 juta – Rp.70 juta untuk kelompok simpan pinjam. Jumlah kelompok simpan pinjam yang dibina 76 kelompok UBSP.

Walaupun kelompok sudah cukup mandiri dan berjalan baik, yang didukung oleh petani penggerak yang dapat mempengaruhi kebijakan di tingkat desa namun masih banyak kelemahan karena untuk mempengaruhi kebijakan yang lebih luas termasuk mengakses

modal masih cukup sulit. Hal ini karena masing-masing kelompok berjuang sendiri-sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu terobosan baru yang lebih luas.

3. Pendekatan Kolaborasi PDABM- Sub DAS Aemau (Tahun 2003-sekarang)

Menyadari akan kelemahan dari pendekatan kelompok maka pada tahun 2002 YMTM mulai mengembangkan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi antar pihak yaitu pendekatan kolaborasi pengelolaan DAS yang berbasis masyarakat (Community Based-Integrated Watershed Management).

Untuk menindak lanjuti pendekatan kolaborasi pengelolaan DAS yang berbasis masyarakat ini, maka pada tahun 2003, muncul inisiatif dan kesepakatan untuk membangun kolaborasi multipihak dalam pengelolaan DAS Aesesa, dengan memulai kegiatan di Sub DAS Aemau. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Kehuatan dan BAPPEDA, YMTM, wakil masyarakat dengan dukungan VECO, VSO dan World Neighbors merumuskan rancangan program dan strategi pengelolaan Sub DAS Aemau. Kegiatan-kegiatan utama yang telah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2003 – tahun 2006 antara lain:

- Pengkajian sosial ekonomi masyarakat secara partisipatif menggunakan metodologi PRA, menghasilkan sejumlah temuan masalah dan potensi sumber daya. Masalah dan potensi kemudian dianalisa secara partisipatif di tingkat dusun, tingkat desa dan tingkat sub DAS Aemau.
- Lokakarya perencanaan tingkat desa, menghasilkan rencana tingkat desa, yaitu rencana-rencana yang bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat tanpa membutuhkan dukungan dari pihak luar.
- Lokakarya tingkat sub DAS Aemau menghasilkan rencana tingkat sub DAS (antar desa), yaitu rencana-rencana yang membutuhkan kerjasama antar desa atau wilayah karena tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa yang bersangkutan. Contohnya adalah pengelolaan kebakaran, pengelolaan ternak lepas, dan lain-lain.
- Kajian kebijakan pemerintah secara partisipatif, diketahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, dinas-instansi kabupaten dan Pemda, sejauh mana mendukung pengelolaan DAS atau kurang mendukung pengelolaan DAS. Kajian ini sangat penting untuk memberikan masukan-masukan bagi perbaikan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa yang akan datang, sehingga lebih berpihak pada pengelolaan DAS.
- Lokakarya pleno perencanaan multi pihak di tingkat kabupaten, mengikut sertakan semua pihak dinas, badan, instansi, Camat DPRD, LSM, masyarakat dan unsur tokoh agama. Hasil lokakarya adalah adanya rencana multipihak yang akan ditindak lanjuti oleh dinas-instansi, LSM dan pihak lain. Sebagai bukti komitmen bersama maka pada akhir lokakarya dibuat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh 9 orang Kepala Desa, 3 orang Camat, Bupati dan 1 orang Wakil LSM.
- Pengembangan jaringan tingkat masyarakat dan multipihak. Pada tingkat masyarakat terbentuk FORPELDAS (Forum Peduli Lingkungan Daerah Aliran Sungai) sebagai wadah pengawal rencana-rencana pada tingkat masyarakat. Forum ini beranggotakan 9 orang yang merupakan wakil-wakil dari 9 desa ditambah 9 orang kepala desa. Sedangkan pada tingkat multipihak dibentuk Forum Multipihak dibawah koordinasi

Asisten II Bupati dan BAPPEDA. Untuk menyukseskan dan efektifitas FORPELDAS dan Forum Multipihak maka dilakukan monitoring serta pertemuan secara rutin. Pengurus FORPELDAS melakukan monitoring setiap bulan dan pertemuan rutin tiga bulanan, serta pertemuan 6 bulan bersama dengan Forum Multipihak. Pertemuan rutin ini untuk mengevaluasi rencana kerja 6 bulanan, perencanaan dan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sekaligus mencari jalan keluarnya bersama-sama secara partisipatif.

- Pengintegrasian perencanaan pengelolaan DAS ke dalam mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan LSM. Rencana-rencana yang sudah ada diangkat kembali dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Murenbangda. Selain itu dibawah koordinasi BAPPEDA dalam konsultasi anggaran tim eksekutif diingatkan kembali tentang rencana pengelolaan Sub DAS Aemau, yang menjadi tanggung jawab dinas-instansi yang bersangkutan.
- Kajian-kajian partisipatif yang mendukung pengelolaan Sub DAS Aemau. 1). Kajian hak penguasaan dan pengelolaan lahan suku di Suku Rendu (5 desa). Kajian ini memberikan masukan tentang kemungkinan pembagian lahan-lahan suku kepada anggota sehingga ada kepastian hak kelola lahan. Hal ini karena YMTM selama mendampingi masyarakat ada masyarakat yang belum mau mengembangkan program pertanian berkelanjutan karena ketidak pastian hak kelola lahan bagi mereka. 2). Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut telah dilakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat di beberapa wilayah sekaligus pemetaan dengan menggunakan GIS. Kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan pengembangan wanatani. 3). Penelitian pengelolaan kebakaran. Penelitian ini meliputi beberapa kegiatan yaitu : pembakaran pencegahan, pengembangan demplot pertanian berkelanjutan, penguatan kelompok, penelitian jenis dan manfaat tanaman hutan lokal, dan GIS. Semua kegiatan ini dilakukan untuk memberikan solusi terbaik bagi masalah kebakaran padang yang terjadi setiap tahunnya, dan berdampak pada penghidupan masyarakat Sub DAS Aemau.

4. Strategi Pendampingan Program

Dalam rangka mendukung pengembangan program, maka YMTM mengembangkan beberapa strategi program, antara lain;

- Penempatan Staf dan pengembangan kader (petani penggerak), dilakukan pada desa-desa baru karena masyarakatnya membutuhkan sharing dan diskusi yang terus menerus dalam mengembangkan usaha mereka. Walaupun demikian, disepakati bersama kapan staf dapat dipindahkan dari desa-desa baru tersebut. Selama ada staf, dilakukan pula penguatan kepada kader-kader yang ke depan diharapkan dapat mengambil alih peran pendampingan di kelompok atau desa.
- Supervisi berkala, dilakukan pada desa-desa yang telah ditinggalkan karena berdasarkan kriteria '*phasing out*' sudah mampu mengelola program sendiri. Supervisi berkala umumnya dijadwalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- Dukungan penguatan kapasitas, banyak kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan, pertemuan berkala antar desa, kunjungan silang. Melalui proses ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat berubah dan menambah kepercayaan diri mereka dalam berusaha dan berhubungan dengan pihak luar.

- Dukungan media, karena keterbatasan staf maka media-media tepat guna dijadikan alat penyampai informasi yang sangat efektif. Media-media yang ada didiskusikan oleh kelompok dalam rangka membangun pemahaman bersama.
- Pengembangan jaringan, hal ini sangat bermanfaat dalam rangka memperkuat posisi tawar masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, pengembangan jaringan juga memberi ruang yang besar kepada masyarakat untuk saling berbagi informasi tidak saja dengan sesama petani tetapi juga dengan stakeholders terkait.
- Evaluasi dan Perencanaan bersama, merupakan strategi yang paling ampuh untuk membangun komitmen dan rasa memiliki program. Melalui proses ini kelompok atau masyarakat dapat mendiskusikan berbagai perkembangan dan hasil yang dicapai selama enam bulan atau setahun. Dari sana pula, masyarakat mulai membahas upaya-upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

5. Pelajaran Menarik

- Hidup bersama masyarakat mendorong terbangunnya keakraban antara masyarakat dengan YMTM dan mitra sehingga memudahkan pengembangan dan implementasi program bersama
- Partisipasi tinggi atas kehadiran dari masyarakat dan Dinas instansi waktu kajian, membangun pemahaman dan komitmen bersama
- Ada perubahan kemampuan dan pengetahuan tentang teknik dan cara memfasilitasi proses pengelolaan DAS
- Swadaya masyarakat mendukung kegiatan proses penegeloaan DAS (mulai kajian sampai pertemuan tingkat Desa RTL) dan masyarakat merasakan bahwa yang dilakukan adalah program mereka bukan orang luar
- Ada keterbukaan tentang pengelolaan dana dari pemerintah dan LSM lain dan terbangun kepercayaan untuk saling mendukung
- Hubungan Pemda dan LSM makin tinggi dan memungkinkan kerjasama kolaborasi yang lebih luas
- Masyarakat memandang kerjasama LSM dan Pemda sebagai kesatuan yang saling memperkuat
- Egosectoral menurun, karena ada program bersama Pemda LSM dan Dinas antar Dinas

6. Masalah dan Tantangan

Berdasarkan pengalaman-pengalaman YMTM selama bersama masyarakat mengembangkan berbagai program yang mendukung pengelolaan DAS dan penghidupan masyarakat di Sub DAS Aemau, DAS Aesesa terdapat beberapa masalah dan hambatan yang perlu diperbaharui lagi yaitu:

- Petani penggerak yang menjadi motor penggerak program, kurang mempunyai kapasitas yang memadai untuk mempengaruhi masyarakat dalam areal yang lebih luas, masih terbatas pada kelompok dan antar kelompok di suatu desa.

- Demikian juga pengurus dan anggota Forpeldas belum mempunyai kapasitas dan pengaruh dalam tingkat kawasan sehingga sulit untuk mengawal rencana lintas desa atau kawasan Sub DAS Aemau.
- Dampak program terhadap peningkatan penghidupan masyarakat di sub DAS Aemau masih terbatas pada kelompok-kelompok tani dan UBSP yang didampingi
- Realisasi pelaksanaan rencana kegiatan di Sub DAS Aemau, masih tergantung pada dukungan pihak luar, akibat ketiadaan dana yang dimiliki pemerintah desa

7. Strategi Pengelolaan Sub DAS Aemau DAS Aesesa Kedepan

Seperti diuraikan diatas bahwa selama bersama masyarakat dan mitra lain membangun kemitraan dalam pengelolaan Sub DAS Aemau, DAS Aesesa banyak keberhasilan dan banyak juga tantangan dan hambatan yang ditemui. Untuk itu diperlukan suatu strategi terobosan baru yang mampu memperkecil kelemahan dalam pengelolaan Sub DAS Aemau, DAS Aesesa. Strategi yang kami tawarkan untuk pengelelolaan Sub DAS Aemau pada waktu yang akan datang yaitu :

- 1) Memperkuat pemerintah desa sebagai sentral pembangunan dan pengelolaan Sub DAS Aemau (UU no.32 tentang otonomi daerah), untuk itu harus didukung dengan :
 - Memfasilitasi pemetaan dan rencana tata ruang pengelolaan lahan secara partisipatif dan didukung dengan GIS
 - Memfasilitasi rencana kerja secara detail sebagai tindak lanjuti dari pemetaan tataguna lahan
 - Membangun kesepakatan atau aturan main antar masyarakat (Perdes) dan antar desa (Perda) yang mengikat semua masyarakat dalam melaksanakan rencana kerja yang sudah dibuat.
 - Memfasilitasi desa dalam memperoleh dukungan dana dari pihak luar (Pemerintah dan donor luar) yang dapat dikelola sendiri oleh pemerintah desa
- 2) Memperkuat dan memperbanyak petani-petani penggerak sebagai kader-kader pemimpin melalui pendekatan individu yang berkualitas dengan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu.
- 3) Memperluas dampak program pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan di kawasan Sub DAS Aemau, yang didukung oleh teknik-teknik pengelolaan api
- 4) Memperkuat institusi kelompok tani dan kelompok UBSP sebagai wadah pelaksanaan kegiatan program dan akses dana dalam mendukung peningkatan penghidupan yang berkelanjutan
- 5) Memfasilitasi lembaga keuangan desa (koperasi kredit) yang membawahi kelompok-kelompok UBSP sebagai wadah akses modal masyarakat, dan Koperasi pemasaran komoditi yang membantu memasarkan hasil komoditi masyarakat.
- 6) Memperkuat Forpeldas sebagai wadah koordinasi antar petani dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan antar desa dan wadah advokasi kebijakan pada level kabupaten.
- 7) Memaksimalkan Forum multipihak sebagai wadah koordinasi rencana pengelolaan Sub DAS Aemau dengan pihak pemerintah dan LSM.

- 8) Menggunakan media-media informasional dan instruksional untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan stakeholders. Serta mendokumentasikan berbagai pengalaman untuk di 'share' kepada mitra-mitra. Upaya ini didukung oleh SDM Kupang.

**PENGELOLAAN KEBAKARAN, KERJASAMA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PEDESAAN DI NUSA TENGGARA TIMUR:
PELAJARAN DARI PROYEK YANG DIBIYAI OLEH ACIAR
DI SUMBA TIMUR DAN NGADA**

Russell-Smith J^{1,2}, Djoeroemana S³, Hill GJE^{2,4,5}, Maan J⁶, Myers BA⁴, Pandanga P³

¹ Bushfires Council of the Northern Territory, Darwin, Northern Territory, Australia

² Tropical Savannas Management Cooperative Research Centre, Darwin, Northern Territory, Australia

³ Wira Wacana School of Economics, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

⁴ Charles Darwin University, Darwin, Northern Territory, Australia

⁵ University of the Sunshine Coast, Maroochydore, Queensland, Australia

⁶ Yayasan Mira Tani Mandiri, Bajawa, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: Jeremy.Russell-Smith@nt.gov.au

ABSTRAK

Nusa Tenggara Timur (NTT) menghidupi lebih dari 4.5 juta jiwa; 85% dari jumlah penduduk bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian. NTT banyak terdiri dari sabana rawan kebakaran. Api digunakan sebagai alat penting pada kehidupan pedesaan dan system pengelolaan tanah. Dengan transformasi pesat pada struktur masyarakat pedesaan dalam dekade dewasa ini, tingginya pertumbuhan penduduk (2% p.a.), terbatasnya lahan cukup-air, adanya konflik kepemilikan tanah baik antar-masyarakat maupun masyarakat-pemerintah, di NTT banyak terjadi kegagalan pada cara tradisional dalam pengelolaan kebakaran yang dikelola oleh penduduk setempat sehingga kebakaran yang tak terkendali berakibat pada aset-aset lingkungan hidup, sumber mata pencaharian, dan kondisi ekonomi.

Menindak lanjuti lokakarya preliminary regional di Kupang pada tahun 1995 dan Darwin pada tahun 1999, proyek penelitian berfokus pada pembangunan kapasitas pengelolaan kebakaran di institusi regional NTT dan masyarakat yang secara resmi terselenggara pada tahun 2000 dengan dukungan biaya pokok dari *the Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR) dan badan lain di Australia. Proyek tersebut telah menunjukkan terkoordinasinya, pendekatan berdasar-masyarakat pada pengelolaan kebakaran di empat skala-desa sebagai tempat peragaan di Sumba Timur dan Flores tengah. Bekerja dengan masyarakat setempat, pemerintah NTT (BAPPEDA NTT, Dinas Kehutanan), Sekolah Tinggi Ekonomi Kristen Wira Wacana (Wira Wacana Christian School of Economics, Satya Wacana University), dan LSM setempat yang terorganisir dengan baik, proyek tersebut telah terimplementasi:

- Aktivitas pengelolaan kebakaran pada tiap desa studi (berkisar pada ukuran antara 10-70 km²), khususnya berfokus pada tanaman wanatani nilai-tinggi. Yang terpenting, komponen proyek ini telah dikembangkan dalam kerangka kerja ‘*action research*’, dimana aktivitas dikembangkan secara kolektif, termonitor dan teruji oleh masyarakat, institusi dan mitra (sekutu) peneliti.

- Penyuluhan masyarakat, kegiatan perencanaan dan latihan – yang kemudian termasuk pengamatan daerah terpencil (pemetaan kebakaran dengan menggunakan data satelit) serta dalam kaitannya dengan latihan GIS untuk staff BAPPEDA NTT, dan latihan sumber inventaris yang berfokus pada pemeriksaan status limitasi yang tersisa pada sumber kehutanan.
- Pengembangan kapasitas pendidikan, khususnya melalui transfer susunan modul ekologi yang dikembangkan melalui *the Tropical Savannas Cooperative Research Centre*, dan kursus-kursus pelatihan terkait, disampaikan ke Satya Wacana University (berada di Salatiga, Java), yang merupakan penyeter utama pendidikan tinggi untuk NTT.
- Dari pengkajian independen belum lama ini diketahui bahwa proyek pendekatan tersebut dirasa sukses dan tepat sasaran untuk kebutuhan setempat dengan mengikut sertakan masyarakat dan para institusi terkait.

Introduksi

Di tahun belakangan ini telah ada perhatian dan diskusi internasional mengenai kebakaran besar yang berkaitan dengan kegiatan El Niño Southern Oscillation (ENSO) di Indonesia bagian barat dan Papua Barat. Dalam hal ini telah dilakukan beberapa pengkajian yang termasuk didalamnya adalah mempelajari penyebab dasar, khususnya di Indonesia bagian barat (Applegate *et al.* 2001; Colfer 2002; Tacconi 2003; Mudiyarso *et al.*, 2004; Dennis *et al.* 2005). Namun sebaliknya, sangat kecil sekali apresiasi yang ditunjukkan, pengutamaan mengenai kondisi, serta implikasi pola kebakaran yang terjadi di daerah lain di kepulauan Indonesia, khususnya wilayah yang bermusim kemarau panjang, termasuk Nusa Tenggara Timur (NT: Dennis 1999).

Mengetahui bahwa di NTT (1) lebih dari 85% penduduknya bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian yang termasuk didalamnya 75-80% sektor tenaga kerja langsung dari penduduk tersebut (Barlow *et al.* 1990), antara tahun 1993-1997 berkontribusi 40% dari GDPnya sendiri (Djoeroemana *et al.* 2000), dan (2) kebakaran merupakan komponen gabungan antara tradisional/budaya dan pertanian kontemporer/sistem pengelolaan hutan (Fox 1977; Ataupah 2000; Bamaulin 2000; Gadas 2000; McWilliam 2000; Mudita 2000; Therik 2000), dalam hal ini telah digaris bawahi bahwa pengelolaan kebakaran yang tepat sangat penting bagi kelangsungan lingkungan hidup dan mata pencaharian penduduk setempat di wilayah rawan kebakaran.

Dalam kaitannya dengan ini, di tahun 1995, pada sebuah pertemuan di Kupang yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia Timur dan Australia Utara, dipahami bahwa di NTT pola kebakaran serta penyebabnya saat ini diidentifikasi sebagai area utama untuk kerja sama dibidang penelitian. Selanjutnya, topik tersebut ditindaklanjuti dengan lokakarya di Darwin tahun 1999 yang dibiayai oleh *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)*, dengan kajian makalah yang dipublikasi dalam seri *Proceeding ACIAR* (Russell-smith *et al.* 2000). Hasil dari lokakarya tahun 1999 adalah pengembangan proyek penelitian dengan biaya utama dari ACIAR, *Dampak kebakaran dan penggunaannya untuk pengelolaan lahan dan hutan berkelanjutan di Indonesia dan Australia Utara*, yang dimulai tahun 2000 dan selesai di tahun 2005.

Ada dua hal yang diungkapkan dalam makalah tersebut diatas. Pertama, memahami rancangan kunci pelaksanaan penelitian kebakaran, ini merupakan petunjuk untuk mempertimbangkan peran pengelolaan kebakaran dalam konteks model ‘pembangunan pedesaan terpadu yang berkelanjutan’ di NTT seperti yang disampaikan oleh Djoeroemana (jilid ini). Model itu sendiri adalah produk dari program penelitian kebakaran. Kedua, kami mendeskripsikan kemitraan dan kegiatan-kegiatan yang telah dikembangkan untuk menyajikan program yang efektif.

Pengelolaan kebakaran dan model Pembangunan Pedesaan Terpadu yang Berkelanjutan di NTT

Pengembangan mata pencaharian di NTT dipengaruhi oleh empat ‘komponen’ atau ‘bidang kegiatan’ – Sosial-Budaya, Politik, Lingkungan, Ekonomi (Djoeroemana, jilid ini). Pengelolaan kebakaran berinteraksi dan berdampak pada masing-masing bidang kegiatan. Pola hidup masyarakat dengan tindak pembakaran tanpa pengelolaan/pengendalian yang dilakukan terus menerus berakibat pada gangguan tanaman, pakan ternak dan bangunan, dampak pada sumber hutan, peningkatan erosi tanah dan mengakibatkan sedimentasi pada aliran sungai/tepi pantai (Bamaulin 2000; Gadas 2000; Mc William; Mudita 2000). Yang tak begitu nampak adalah pengaruh sosial-budaya dan politik. Lebih lanjut disampaikan dalam Russell-Smith *et al.* (2006), beberapa bagian permasalahan budaya dan politik perlu ditangani apabila kita ingin menghasilkan perkembangan yang efektif.

Pertama, dalam bidang kegiatan sosial-budaya perlu diperhatikan (1) struktur/tingkatan sosial suku setempat, sistem kepemilikan lahan, kemungkinan adanya pengaruh dari kelompok desa ke desa lain, dan (2) perubahan kemasyarakatan yang cukup pesat yang terjadi pada dekade belakangan ini, kebanyakan yang nampak adalah perubahan tingkatan struktur sosial tradisional menjadi bentuk yang lebih sepadan. Konflik terhadap kepemilikan lahan antar desa yang biasa terjadi yang dapat menimbulkan baik perselisihan terbuka atas penggunaan dan pengelolaan sumber, yang mengakibatkan tidak adanya pengelolaan kebakaran pada lahan bermasalah, dan/atau kebakaran digunakan sebagai alat untuk pertengkaran. Meningkatnya tekanan pada masyarakat karena pembagian lahan perkebunan dan sumber hutani yang terbatas hanya memperburuk konflik yang ada. Jumlah penduduk di NTT saat ini meningkat sekitar 2% per tahun (Biro Pusat Statistik 2002).

Kedua, dalam ranah politik, permasalahan utama yang berakibat langsung pada mata pencaharian adalah konflik kepemilikan lahan, dan permasalahan mengenai akses untuk, dan penggunaan sumber, antara masyarakat setempat dan penguasa yang memegang aturan, khususnya Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan membawahi sekitar 30% wilayah di NTT (termasuk wilayah bukan lahan hutan). Konflik utama mengenai lahan mengakibatkan pembakaran terhadap lahan yang dipersiapkan untuk hutan dan perkebunan karena ketidakpuasan masyarakat sebagai tuntutan hak tradisional atas lahan (McWilliam 2000). Dennis *et al* (2005) menyebutkan bahwa konflik kepemilikan lahan merupakan faktor utama terjadinya aktifitas pembakaran lahan yang mengganggu di Indonesia bagian barat.

Ketiga, juga dalam ranah politik, Kebijakan Pemerintah Daerah NTT “*Melarang segala bentuk pembakaran yang sia-sia demi upaya pengendalian tindakan pembakaran. Kebijaksanaan tersebut di dukung oleh perspektif dan petunjuk nasional, namun sumber awalnya dapat diidentifikasi dalam sejarah penghukuman penjajahan Belanda terhadap penggunaan kebakaran untuk pengelolaan dan pembukaan lahan.*”(McWilliam 2000;81). Menyinggung agenda kebijaksanaan nasional yang lebih luas, Tacconi & Ruchiat (2005) menyatakan permasalahannya sama-sama terang-terangan, “...kebijaksanaan kebakaran pada titik nol sekarang ini sama sekali tidak menangani masalah pengelolaan regional yang dibutuhkan, tidak ada upaya, dan tidak dapat diupayakan”. Akibat nyata kebijakan pada mata pencaharian masyarakat dirasakan di seluruh penjuru Indonesia. (Tacconi 2003; Dennis *et al.* 2005), kecuali khususnya pada wilayah semi-tandus dimana kegiatan pembakaran, merupakan bagian dari sistem pertanian.

Sebagai tambahan, faktor sosial – budaya dan politik tersebut, menyatu dengan kecenderungan alamia pada tatanan sabana regional untuk melakukan pembakaran di kala musim kering berlangsung, memberi pengaruh pada kondisi lingkungan hidup, sumber mata pencaharian, dan itu berarti kondisi ekonomi. Selanjutnya, dengan adanya faktor-faktor tersebut, hampir dapat dinyatakan bahwa, tanpa pengelolaan kebakaran yang efektif dan dukungan kebijakan lingkungan, perkembangan kehutanan dan pertanian yang berkelanjutan di NTT akan terus sulit untuk dilaksanakan.

Penelitian terhadap hasil pengelolaan kebakaran – pengembangan kemitraan masyarakat.

Kami mengetahui bahwa, kalau proyek yang diselenggarakan bermanfaat bagi masyarakat di NTT, semua unsur masyarakat yang bekerjasama harus dilibatkan dalam pembuatan perencanaan – masyarakat setempat itu sendiri, pemerintahan setempat, sektor non-pemerintah (LSM), dan karena dasar kegiatan berupa penelitian, maka tepat bila lembaga penelitian regional dan lembaga pendidikan tinggi untuk dilibatkan. Seperti yang telah dijelajahi dalam lokakarya, bahwa proyek diharapkan akan di selenggarakan di tiga tempat (masing-masing di Timur Barat, Sumba Timur, Ngada-central Flores), berfokus pada masalah skala-wilayah, dan melibatkan masyarakat setempat secara langsung baik dalam rancangan maupun pelaksanaan kegiatan penelitian dalam kerangka kerja penelitian.

Seperti apa yang telah terjadi, karena dana dan berbagai kegiatan politik telah mengakibatkan pengurangan proyek pada skala empat desa di Sumba Timur dan Ngada (fig.1), dengan masing-masing lokasi dekat dengan pusat kota Waingapu (Sumba Timur) dan Bajawa (Ngada). Meskipun demikian, hal ini tidak merubah fokus kegiatan serta tetap melibatkan pemuka masyarakat, pemerintah setempat (Kecamatan dan BAPPEDA NTT; Dinas Kehutanan), LSM setempat, Lembaga Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana, Universitas Satya Wacana). Badan terkait di Australia Utara, Charles Darwin University, Tropical Savvanas Management, Coopertaive Research Centre, dan Bushfires Council of the Northern Territory (Lembaga Pemerintah Northern Territory).

Proyek kepemimpinan, penyeleksian staff dan segala administrasi untuk komponen di NTT disediakan melalui Wira Wacana, namun di Ngada, aktifitas tersebut

diselenggarakan melalui LSM setempat (Yayasan Mira Tani Mandiri - YMTM). Hal ini kemudian terbukti sangat efektif karena dapat saling menghargai program pembangunan lain yang diselenggarakan melalui YMTM. BAPPEDA dalam hal ini menyumbangkan dua karyawan berpotensi untuk *Geographic Information System (GIS)* dan *Remote Sensing training (pelatihan pengindraan jarak jauh)*, sementara untuk karyawan lainnya diseleksi melalui Wira Wacana dan YMTM – dengan hasil memuaskan. Peran dari sekutu/mitra kerja Australia Utara adalah untuk menyediakan pengarahan teknis dan masukan bila diperlukan – khususnya melalui perencanaan kunjungan rutin, serta beberapa elemen pelatihan yang diselenggarakan di Darwin dan Bogor.

Elemen kunci selanjutnya adalah, mempekerjakan staff di Sumba Timur khususnya, penyelenggaraan proses panjang konsultasi dan sosialisasi dengan masyarakat desa; proses tersebut telah dilangsungkan di Ngada melalui aktifitas YMTM secara terus menerus. Setelah tercapainya kesepakatan antara pihak perencana pelaksanaan penelitian dan kegiatan pembangunan, proyek dapat dilangsungkan di lapangan atas kerjasama berdasar pada kemasyarakatan. Selang beberapa waktu dalam proyek, kegiatan utamanya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Latar belakang dokumentasi dan dari perkiraan mata pencaharian serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, pelaksanaan pengelolaan kebakaran, dan struktur sosial/masyarakat serta data demografik, untuk menyediakan pemahaman terhadap permasalahan pengelolaan kebakaran pada desa-desa khusus dan lebih regional. Pelajaran ini telah disusun sebagai pelajaran situs laporan yang substansial. (ACIAR 2004a, b)
- Implementasi pada struktur aktifitas pengelolaan kebakaran pada masing-masing desa studi (ukuran berkisar pada 10-70km²), khususnya berfokus pada nilai-tinggi perkebunan wanatani.
- Penyuluhan masyarakat, perencanaan dan aktifitas latihan – termasuk kemudian *remote sensing* (pemetaan kebakaran menggunakan data satelit) dan kaitanya dengan pelatihan GIS untuk staf BAPPEDA, serta pelatihan sumber inventori yang berfokus pada pengkajian status terbatasnya sisa sumber hutan. Pemetaan kebakaran telah dipresentasikan di Fisher *et al.* (2006), dan kerja sumber inventory di presentasikan di Russell-Smith *et al.* (2006).
- Pengembangan kapasitas pendidikan, khususnya dengan penyampaian pembangunan susunan modul ekologi melalui *Tropical Savannas Management Cooperative Research Centre*, dan kursus-kursus terkait lainnya, yang disampaikan oleh Universitas Satya Wacana (yang berada di Salatiga, Jawa), yang merupakan penyedia terbesar untuk NTT.

Pengkajian independen yang dilakukan belum lama ini menemukan bahwa pendekatan proyek tersebut memenuhi kebutuhan setempat dengan sukses yaitu dengan melibatkan seluruh masyarakat dan institusi terkait (House & Saragih 2005).

Catatan yang diberikan oleh para pengkaji, ditemukan beberapa dampak dari proyek tersebut, yaitu;

Dampak terhadap masyarakat (Sosial, Ekonomi, Lingkungan dll)

Keuntungan langsung pada pendapatan desa melalui bertambahnya lahan produktif, khususnya di Flores dimana sayuran ditanam diantara pepohonan dan pakan ternak. Dampak jangka pendek di Sumba terbatas pada peringatan dan pemahaman akan kebakaran serta pengelolaannya. Dampak terhadap masyarakat yang paling signifikan adalah pada kelompok-kelompok masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan umum. Kelompok-kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki mengenai pengelolaan kebakaran, dan diharapkan akan berkembang pada desa-desa disekitarnya yang akhirnya dapat meluas ke kecamatan. Hal ini merupakan bentuk penyuluhan yang sangat kuat, dimana para peneliti dapat menunjukkan pada mereka apa yang dapat dilakukan.

Dampak pembangunan kapasitas

Pembangunan kapasitas terjadi di beberapa tempat selama berlangsungnya proyek ini. Pertama, suksesnya pelatihan GIS/remote sensing yang diikuti oleh pegawai BAPPEDA setempat telah menghasilkan tidak hanya bertambahnya keahlian yang dapat memberikan nilai tambah pada proyek ini saja, tapi juga keahlian yang sangat dibutuhkan dalam tujuan pengelolaan sumber alam. Hal yang sangat meningkatkan semangat dimana *pengelolaan lahan dan hutan di Indonesia dan Australia Utara*, yang diselenggarakan tahun 2000 akhirnya dapat terselesaikan di tahun 2005.

Dua hal yang perlu diingat dalam makalah ini. Pertama, sebagai dasar untuk memahami rancangan kunci dalam pengimplementasian penelitian kebakaran, hal ini perlu di pertimbangkan peran dari pengelolaan kebakaran itu sendiri dalam konteksnya dengan “pembangunan pedesaan terpadu yang berkelanjutan” untuk NTT seperti yang telah disampaikan oleh Djoeroemana (jilid ini); hasil yang dikembangkan dalam program penelitian kebakaran. Kedua, disebutkan sebagai kerjasama dan kegiatan yang dikembangkan untuk menyampaikan program yang efektif.

Pengelolaan kebakaran dan model Pembangunan Pedesaan Terpadu yang Berkelanjutan di NTT

Pengembangan mata pencaharian di NTT dipengaruhi oleh empat ‘komponen’ atau ‘bidang kegiatan’ – Sosial-budaya, politik, lingkungan, ekonomi (Djoeroemana, jilid ini). Pengelolaan kebakaran berinteraksi dan berdampak pada masing-masing bidang kegiatan. Pola hidup masyarakat dengan tindak pembakaran tanpa pengelolaan/pengendalian yang dilakukan terus menerus berakibat pada gangguan tanaman, padang rumput dan bangunan, dampak pada sumber hutan, peningkatan erosi tanah dan mengakibatkan sedimentasi pada aliran sungai/tepi pantai (Bamaulin 2000; Gadas 2000; McWilliam 2000; Mudita 2000). Pengaruh sosial-budaya dan politik tidak begitu signifikan. Selengkapnya dapat dilihat di Russell-Smith *et al.* (2006), Beberapa bagian permasalahan budaya dan politik perlu diperhatikan bila hasil pembangunan yang efektif diharapkan.

Pertama, dalam bidang kegiatan sosial-budaya perlu diperhatikan (1) struktur/tingkatan sosial suku setempat, sistem kepemilikan lahan, kemungkinan adanya pengaruh dari kelompok desa ke desa lain, dan (2) perubahan kemasyarakatan yang cukup pesat yang terjadi pada dekade belakangan ini, kebanyakan yang nampak adalah perubahan tingkatan

struktur sosial tradisional menjadi bentuk yang lebih sepadan. Konflik terhadap kepemilikan lahan antar desa yang biasa terjadi yang dapat menimbulkan baik perselisihan terbuka atas penggunaan dan pengelolaan sumber, yang mengakibatkan tidak adanya pengelolaan kebakaran pada lahan bermasalah, dan/atau kebakaran digunakan sebagai alat untuk pertengkaran. Meningkatnya tekanan pada masyarakat karena pembagian lahan perkebunan dan sumber hutan yang terbatas hanya memperburuk konflik yang ada. Jumlah penduduk di NTT saat ini meningkat sekitar 2% per tahun (Biro Pusat Statistik 2002).

Daftar Pustaka

- ACIAR. 2004a. Preliminary rural appraisal for East Sumba study area. ACIAR: Canberra.
- ACIAR. 2004b. Preliminary rural appraisal for Ngada study area. ACIAR: Canberra.
- Applegate G.B.A., Chokkalingum U. and Suyanto S. 2001. The underlying causes and impacts of fires in Southeast Asia. Center for International Forestry Research, International Center for Agroforestry Research, US Agency for International Development, US Forest Service: Bogor. CIFOR
- Ataupah, H. 2000. Fire, traditional knowledge, and cultural perspectives in Nusa Tenggara Timur. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91, 73–76.
- Bamaulin, A. 2000. Fire, traditional knowledge, and cultural perspectives in Nusa Tenggara Timur. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91. 69–72.
- Barlow, C., Gondowarsito R., Birowo A.T. and Jayasuriya S.K.W. 1990. Development in Eastern Indonesia: The case of Nusa Tenggara Timur. International Development Issues No.13, Australian International Development Assistance Bureau, Canberra.
- Biro Pusat Statistik. 2002. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. Biro Pusat Statistik: Kupang.
- Colfer, C.J.P. 2002. Ten propositions to explain Kalimantan's fires. Pp. 309–324 in 'Which way forward? People, Forests and Policymaking in Indonesia', ed. by C.J.P. Colfer and I.A.P. Resosudarmo. Resources for the Future: Washington DC.
- Dennis, R. 1999. A review of fire projects in Indonesia, 1982–1998. Center for International Forestry Research, International Centre for Research in Agroforestry, UNESCO, European Commission: CIFOR: Bogor.
- Dennis, R.A., Ruchiat, Y., Permana, R.P., Suyanto, S., Kurniawan, I., Maus, P., Stolle, F. and Applegate, G. 2005. Fire, people and pixels: linking social science and remote sensing to understand underlying causes and impacts of fires in Indonesia. *Human Ecology* 33, 465–504.
- Djoeroemana, S., Semangun, H., Saragih, B. and Sulthoni, A. 2000. The implications of fire management and restoration for economic development in East Nusa Tenggara. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91, 52–55.
- Fisher R., Bobalinda, E.W., Rawambaku, A., Hill, G.J.E. and Russell-Smith, J. (2006). Remote sensing of fire regimes in semi-arid Nusa Tenggara Timur, Eastern Indonesia: patterns and prospects. *International Journal of Wildland Fire*, 15, 307–317.

- Fox, J.J. 1977. *The harvest of the palm: ecological change in Eastern Indonesia*. Harvard University Press: Cambridge USA.
- Gadas, S.L. 2000. Forest land and fire management in East Nusa Tenggara. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91, 62–64.
- House, A. and Saragih, B. 2005. Review of Project FST/2000/001: Impacts of fire and its use for sustainable land and forest management in Indonesia and Northern Australia. ACIAR: Canberra.
- McWilliam, A. 2000. Fire and cultural burning in Nusa Tenggara Timur: some implications of fire management practices for Indonesian government policy. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91, 80–85.
- Mudita, W. 2000. Fire and the management of agricultural systems in East Nusa Tenggara. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91, 56–61.
- Mudiyarso, D., Lebel, L., Gintings, A.N., Tampubolon S.M.H., Heil A. and Wasson M. 2004. Policy responses to complex environmental problems: policy activity on transboundary haze from vegetation fires in Southeast Asia. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 104, 47–56.
- Russell-Smith, J., Djoeroemana, S., Maan, J. and Pandanga, P. (in press). Rural livelihoods and burning practices in savanna landscapes of Nusa Tenggara Timur, eastern Indonesia. *Human Ecology*.
- Tacconi, L. 2003. Fires in Indonesia: causes, costs and policy implications. Occasional Paper 38. CIFOR: Bogor.
- Tacconi, L. and Ruchiat, Y. (2006). Livelihoods, fire, and policy in eastern Indonesia. *Singapore Journal of Tropical Geography*. 27 (1), 67–81.
- Therik, T. 2000. The role of fire in swidden cultivation: a Timor case study. In 'Fire and Sustainable Agricultural and Forestry Development in Indonesia and Northern Australia', ed. by J. Russell-Smith, G.E. Hill, S. Djoeroemana and B.A. Myers. ACIAR Proceedings No. 91, 77–79.

KEUANGAN MIKRO BAGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT MISKIN DI NUSA TENGGARA TIMUR: MASALAH DAN SOLUSINYA DALAM PANDANGAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH

Rozali SM¹

¹ Yayasan Tanaoba Lais Manekat – GMIT Foundation, Kupang, NTT, Indonesia

ABSTRAK

Makalah ini menjelaskan tentang pengalaman Tanaoba Lais Manekat, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang telah berhasil memberikan pelayanan dalam microfinance sebagai bagian dari program yang lebih luas yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan pengusaha di NTT, khususnya Timur Barat. Program pelayanan microfinance TLM saat ini berfokus pada empat komponen: (1) pinjaman kelompok kecil, (2) pinjaman perorangan, (3) penggemukan sapi, (4) pemeliharaan rumput laut. Disamping itu TLM juga menawarkan pelayanan keuangan, yang dalam hal ini diberikan pada pembangunan keuangan dan usaha di bidang pelatihan. Dengan model usaha seperti ini, program microfinance TLM berkembang pesat sejak tahun 1994 yang termasuk didalamnya 17,000 anggota aktif terhitung sampai dengan tahun 2005.

Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi yang tergolong memiliki tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia. Pendapatan perkapita penduduk NTT pada tahun 2004 hanya sekitar 3 juta rupiah atau kurang dari satu per tiga pendapatan perkapita nasional yang mencapai 9,5 juta rupiah. Kemiskinan juga terindikasi dari rendahnya kualitas pembangunan manusia yang secara rata-rata nilainya lebih rendah daripada penduduk Indonesia. Secara statistik, jumlah penduduk NTT yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai sekitar 27%, hampir dua kali lebih besar persentase nasional (15%). Tingkat kepadatan penduduk rendah dan sebagian besar penduduk NTT tinggal di pedesaan. Industri yang ada juga sangat sedikit.

Berbagai program strategis telah dikembangkan dan diimplementasi oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO) untuk mengatasi problema kemiskinan tersebut. Salah satu diantaranya adalah penyediaan layanan keuangan mikro (LKM) yang seringkali direduksi cakupannya menjadi mikro kredit saja. Pelayanan keuangan mikro sesungguhnya memiliki lingkup yang lebih luas dari mikro kredit, dan diyakini sebagai suatu strategi kunci yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Di Indonesia, beberapa pelayanan keuangan mikro (*micro finance*) dinilai telah berhasil mengatasi atau setidaknya mereduksi masalah kemiskinan. Diantaranya adalah pelayanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa (Robinson, 2002), kredit mikro yang disediakan oleh Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), serta pelayanan keuangan mikro oleh Bank Purba di Semarang dan Mitra Karya di Jawa Timur (Seibel dan Parhusip, 1997). Meskipun pelayanan keuangan mikro telah menunjukkan

keberhasilan pengurangan kemiskinan di beberapa tempat di berbagai negara sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah studi, namun beberapa kajian menemukan adanya keterbatasan kemampuan keuangan mikro dalam mengentaskan masyarakat miskin, khususnya yang paling miskin. Di samping itu, format atau disain layanan mikro dan karakteristik lokal juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program tersebut dalam membantu menanggulangi problema kemiskinan.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi terkait pengelolaan keuangan mikro dalam upaya membantu masyarakat miskin di Indonesia, khususnya di NTT. Selain itu, ditrampilkan pula contoh atau model implementasi LKM oleh NGO, khususnya dalam pengalaman Yayasan Tanaoba Lais Manekat (TLM).

Layanan Keuangan Mikro

Definisi Layanan Mikro

Keuangan mikro diartikan sebagai penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan mencakup kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka (Usman *et al.*, 2004). Definisi tersebut memberikan cakupan yang lebih luas daripada sekedar penekanan pada kredit mikro saja, dan juga lebih terfokus kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Selanjutnya, terdapat dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan/atau simpanan, dan/atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset.

Lembaga Penyedia Keuangan Mikro di NTT

Di Nusa Tenggara Timur terdapat beragam lembaga penyedia jasa keuangan mikro (LKM), meliputi lembaga formal bank dan nonbank, lembaga nonformal, program pemerintah, serta lembaga informal. Lembaga Penelitian SMERU (2004) membagi LKM yang beroperasi di NTT ke dalam 4 kelompok, yakni:

1. Lembaga formal, yaitu lembaga yang berbadan hukum dan secara formal diakui oleh perundangan yang berlaku saat ini sebagai lembaga keuangan. Lembaga formal ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu bank (BRI, Bank Mandiri, BPR dsb) dan non bank (KUD, koperasi kredit, dan perusahaan pegadaian).
2. Lembaga nonformal, yaitu lembaga yang telah memiliki dasar legalitas sebagai badan hukum, misalnya yayasan atau dasar legalitas lainnya, seperti Surat Keputusan Gubernur atau Bupati, tetapi belum memiliki izin dan belum diakui sebagai lembaga keuangan formal oleh perundangan yang berlaku saat ini. Lembaga nonformal ini antara lain berbentuk usaha simpan pinjam (USP), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyediakan jasa layanan keuangan mikro.
3. Program-program pemerintah yang menyediakan atau mempunyai komponen pelayanan keuangan mikro, pada umumnya dalam bentuk kredit mikro dan kredit program. Termasuk dalam kategori ini antara lain kredit pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) dan bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM).
4. Lembaga informal, yaitu lembaga yang tidak berbadan hukum seperti kelompok arisan, kelompok gereja, atau sumber informal lainnya.

Masalah dan tantangan pengelolaan LKM di Nusa Tenggara Timur

Sudah banyak lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah, formal ataupun nonformal terlibat dalam pengelolaan LKM melalui sejumlah program ataupun bentuk kegiatan LKM yang juga terus berkembang. Namun, tidak semua program tersebut berhasil dalam membantu masyarakat miskin mengatasi persoalan ekonominya. Permasalahan tampaknya terjadi pada tataran disain dan kebijakan program, besaran pinjaman, dan akses yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- LKM yang dikelola oleh lembaga formal, khususnya perbankan tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh keluarga miskin. Hal ini karena adanya kewajiban memiliki agunan dan kelayakan usaha dalam pemberian kredit. Bentuk agunan yang dipersyaratkan lembaga formal (aset, sertifikat tanah, dsb) umumnya tidak dimiliki masyarakat miskin yang mayoritas petani.
- LKM yang dipraktekkan di Indonesia, khususnya di NTT masih didominasi oleh kegiatan pemberian kredit/pinjaman, dan sangat sedikit yang memperhatikan aspek kebutuhan ekonomi lainnya seperti tabungan dan asuransi.
- Jumlah kredit yang dibutuhkan masyarakat miskin umumnya dalam skala kecil tidak terakomodir dalam skema kredit sebagian besar perbankan.
- Pelayanan keuangan mikro lebih banyak dikaitkan dengan tambahan modal usaha akan tetapi masyarakat miskin seringkali mengajukan kredit pinjaman bukan untuk tambahan modal tetapi sebagai upaya untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran non-usaha.
- Lokasi lembaga LKM yang umumnya berada di kota ataupun pusat kecamatan sulit untuk diakses masyarakat miskin yang tinggal di pelosok.
- Masyarakat miskin yang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari LKM formal ataupun nonformal yang legal seringkali terjebak dalam skema pinjaman bunga tinggi yang dikenakan oleh 'bank gelap' ataupun rentenir.

Program dan implementasi kredit Mikro oleh NGO dalam pembangunan masyarakat miskin Di NTT: pengalaman empirik TLM

Sangat sedikit data dan informasi yang tersedia maupun yang kami ketahui tentang pengelolaan LKM oleh Lembaga swadaya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu pengalaman empirik TLM dalam mengelola LKM selama ini akan mendominasi uraian dan menjadi fokus bahasan tentang layanan keuangan mikro di NTT dalam tulisan ini.

Visi dan Misi Yayasan TLM-GMIT sudah tentu menjadi inspirasi, spirit dan acuan dalam disain dan pengelolaan program LKM yayasan. Visi TLM adalah menyampaikan kasih ALLAH kepada dunia. Sedangkan misinya adalah membangun masyarakat miskin di NTT melalui transformasi kehidupan ekonomi, sosial dan spiritual.

Yayasan TLM didirikan pada November 1994 hingga kini memiliki 1 kantor pusat yang terletak di Kota Kupang dan 10 kantor cabang yang tersebar di Kota Kupang (1 buah), Kabupaten Kupang (4 buah), Kabupaten TTS (Soe), TTU (Kefa) dan Alor (Kalabahi) masing-masing 1 buah. Selain itu, terdapat 2 Pos Pelayanan yakni Pos Pelayanan Rumput

Laut di Rote (Nembrala), dan Pos Pelayanan Sapi Paron di Baun. TLM dikelola oleh 158 orang staf yang terdiri dari 71 orang staf administrasi dan 87 orang staf lapangan.

Cakupan program LKM dan target klien dari Yayasan Tanaoba Lais Manekat

Layanan Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu dari 5 (lima program utama) TLM, disamping 4 program utama lainnya yakni Pelatihan, *Business Developments Service (BDS)*, Pengembangan Masyarakat, dan Pembinaan Rohani. TLM mengelola LKM yang terintegrasi dalam 4 Program, yakni: (1) Program kredit kelompok; (2) Program kredit individu; (3) Program penggemukan sapi; dan (4) program budidaya rumput laut.

Target dari ke-empat program LKM ini adalah para pedagang kecil, petani miskin, dan para pekerja yang memiliki penghasilan rendah. Jumlah klien aktif meningkat dari tahun ke tahun, dan hingga tahun 2005 jumlah klien aktif 16.849 orang dimana jumlah terbanyak ada pada program kredit KUM (67,8%), disusul berturut-turut oleh Program Kredit Individu (21%), Program Penggemukan Sapi (7,5%), dan Program Rumput Laut (3,7%) (Tabel 1). Jumlah klien ini diharapkan terus meningkat dan pada tahun 2007 ditargetkan mencapai 35 ribu klien aktif.

Program Kredit Kelompok

Program ini dikenal sebagai program “KUM” (Kelompok Usaha Mandiri) yang memiliki target pada para pedagang kecil, petani miskin dan pegawai berpenghasilan rendah yang mempunyai usaha untuk mendatangkan penghasilan setiap hari dan sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, namun tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal dari pihak Bank karena tidak memiliki barang jaminan. Untuk mengikuti program ini, para calon klien harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh TLM antara lain menyangkut jenis usaha, usia, status domisili, dan integritas diri calon klien.

Kelompok KUM terdiri dari 5 orang dengan modal usaha dari setiap anggota sebelum pinjaman maksimal Rp. 2.000.000. Pinjaman terdiri atas 6 tahapan, tahapan pertama sebesar Rp. 500.000 meningkat hingga Rp. 5.000.000 pada tahapan keenam. Suku bunga yang diberikan per pinjaman 3% per bulan dalam jangka waktu 20 minggu (5 bulan).

Dasar pemberian pinjaman kepada nasabah TLM adalah KEPERCAYAAN. Lembaga menaruh rasa percaya kepada setiap anggota bahwa pinjaman akan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan bersama. TLM meyakini bahwa pinjaman atau kredit sangat penting artinya apabila dimanfaatkan secara baik dan benar. Sebaliknya, pengelolaan pinjaman yang tidak baik seringkali menimbulkan masalah bahkan dapat menyebabkan hancurnya usaha bisnis.

Pada setiap pinjaman, setiap anggota diwajibkan membayar dan menyimpan uang setiap hari sehingga setiap minggu dapat menyetor 100%. Untuk mendisiplinkan dan membiasakan diri dengan budaya menabung maka setiap anggota diberikan satu kotak tabungan oleh TLM. Pengembalian pinjaman dilakukan setiap minggu pada pertemuan yang dikoordinir oleh petugas pendamping lapangan yang sekaligus juga memberikan motivasi dan bimbingan serta pelatihan. Materi pelatihan yang disediakan TLM

disesuaikan dengan kebutuhan serta latar belakang pendidikan sebagian besar klien yang cukup rendah.

Program Kredit Individu

Program ini melibatkan bekas nasabah KUM dan atau nasabah baru baik pria maupun wanita yang usahanya relatif lebih maju dibandingkan nasabah pada program KUM. Sasaran dari program ini adalah para pedagang kecil dan pegawai berpenghasilan rendah yang mempunyai usaha untuk mendatangkan penghasilan setiap hari dan sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, dan tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal dari Bank.

Oleh karena nasabah yang terlibat dalam program ini adalah mereka yang usahanya sudah relatif lebih maju maka modal usahanya harus lebih tinggi, minimal Rp.2.000.000. Suku bunga pinjaman sebesar 3% per bulan dengan jangka waktu pinjaman per 20 minggu; 12 bulan, atau 24 bulan. Untuk setiap pinjaman dikenakan biaya administrasi 3% dari nilai pinjaman. Pengembalian pinjaman langsung di Kantor cabang TLM di daerah domisili klien.

Program Penggemukan Sapi

Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu gudang ternak, khususnya ternak sapi potong di Indonesia. Diantara jenis ternak besar yang dipelihara masyarakat, populasi sapi adalah yang terbanyak, disusul kerbau dan kuda. Sebagaimana besar ternak sapi tersebut yakni sekitar 77% berada atau dipelihara di Pulau Timor (Tabel 2). Mayoritas peternak sapi adalah juga sebagai petani khususnya petani tanaman pangan. Peternakan memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi pendapatan masyarakat peternak dan daerah. Analisis terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT tahun 2004 menunjukkan bahwa Peternakan (utamanya sapi) dan hasil-hasilnya memainkan peranan yang sangat penting bagi masyarakat NTT. Peternakan memberikan kontribusi 30% terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) NTT yang berasal dari sektor pertanian. Angka ini meskipun lebih rendah dari kontribusi tanaman bahan pangan (51%), namun masih lebih tinggi dari sub-sektor lain dalam bidang usaha pertanian/perikanan lainnya; bahkan jauh lebih tinggi dari sebagian besar lapangan usaha di luar bidang pertanian (BPS NTT, 2005).

Implementasi Program Penggemukan Sapi (mayoritas jenis sapi Bali) terkonsentrasi di Pulau Timor, utamanya di Kabupaten Kupang. Hal ini mengingat populasi ternak sapi terbesar (26%) ada di Kabupaten Kupang (Lihat Tabel 2) dan budaya pemeliharaan sapi penggemukan— lebih dikenal dengan istilah 'paron' memang sudah lama dipraktekkan di daerah ini (khususnya di Kecamatan Amarasi).

Program Paronisasi yang dikembangkan TLM ini merupakan pinjaman kelompok yang terdiri atas 15 sampai dengan 20 orang. Kredit berupa pinjaman yang besarnya disesuaikan dengan harga sapi bakalan pada saat realisasi/pembelian. Realisasi diwujudkan dalam bentuk sapi bakalan dan tidak diberikan secara tunai, hal ini untuk menghindari penyimpangan dalam pemanfaatan dana pinjaman tersebut untuk kegiatan di luar bisnis sapi paron atau kegiatan-kegiatan konsumtif oleh klien.

Jangka waktu pinjaman adalah 6 bulan yakni disesuaikan dengan lama pemeliharaan atau penggemukan sapi bakalan tersebut. Setiap klien dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dari harga pembelian sapi bakalannya. Pendapatan klien (peternak) maupun TLM ditentukan berdasarkan sistem bagi hasil yaitu 60% keuntungan bagi klien, 30% bagi TLM dan 10% bagi gereja yang merekomendasi klien bersangkutan.

Untuk menjamin transparansi maka baik proses pembelian bakalan maupun penjualannya, peternak (klien) dilibatkan secara aktif. Penetapan harga jual ternak hasil penggemukan harus dilakukan dengan penimbangan ternak, tidak dengan sistem taksiran yang umum dipraktekkan dalam proses penjualan sapi paron dan sangat sering merugikan pemilik ternak. TLM berperan aktif dalam pemasaran sapi paron antara lain dengan menyeleksi calon pembeli untuk menemukan pihak yang memberikan tawaran harga tertinggi. Selain itu, TLM juga memberikan training dan pendampingan oleh petugas lapangan selama proses pemeliharaan ternak sapi.

Dalam empat bulan terakhir ini, sebagian besar transaksi pengadaan sapi bakalan dilakukan melalui Pos Servis Sapi di Baun. Di Pos ini, sapi-sapi bakalan yang baru dibeli dari pasar hewan yang umumnya dalam kondisi stress dipelihara selama 1 – 2 minggu untuk menjalani treatment perbaikan kondisi tubuh dan kesehatan serta penimbangan. Perawatan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian vitamin, obat cacing, dan vaksinasi. Dengan demikian, saat penyerahan kepada klien kondisi ternak dalam keadaan baik dan sehat serta berat badan awalnya diketahui sehingga dapat diprediksi produktivitas ternak bersangkutan selama dalam masa paronisasi. Saat ini, disamping program paronisasi TLM sedang melaksanakan implementasi awal dari program baru di bidang ternak sapi yakni program pembibitan (breeding).

Program ini mencakup pembelian sapi-sapi betina produktif yang bunting dan selanjutnya dipelihara oleh klien. Anak sapi (pedet) yang lahir selanjutnya dipelihara oleh klien dan digunakan dalam program paronisasi ataupun program pembibitan. Perkawinan induk selanjutnya dilakukan dengan inseminasi buatan menggunakan semen jantan sapi Brangus. Program ini akan memberikan keuntungan dalam mengatasi masalah ketersediaan sapi bakalan di lapangan yang semakin hari dirasakan semakin menurun baik dalam jumlah maupun kualitas, dan diharapkan pula mampu menekan tingkat pemotongan sapi betina produktif yang sangat tinggi yang mengancam populasi ternak sapi di NTT, khususnya di Pulau Timor.

Program Rumput Laut

Program ini memiliki target pada masyarakat yang bermukim di pesisir pantai yang potensial untuk budidaya rumput laut, yang tidak memiliki akses modal terhadap lembaga perbankan atau pihak lain. Besaran pinjaman ditentukan berdasarkan kebutuhan, permintaan dan analisa, yang berkisar antara Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 20 minggu yang pembayarannya dilakukan setiap 2 minggu (10 kali cicilan). Tingkat bunga yang diberikan 3% per bulan atau dihitung 1,5% per 2 minggu. TLM secara aktif membantu pemasaran hasil dan memberikan training serta pendampingan kepada petani rumput laut untuk meningkatkan ketrampilan serta kualitas hasil produksi.

Realisasi keuangan program LKM TLM

Realisasi keuangan program LKM yang dikelola TLM meningkat secara tajam dalam tahun 2004 mencapai sekitar 222% dibandingkan posisi setahun sebelumnya. Jumlah ini terus mengalami peningkatan sekitar 117% dalam tahun 2005. Program Kredit Individu dan KUM menjadi program favorit memiliki angka realisasi terbesar yakni masing-masing 68 dan 20%, disusul program sapi dan rumput laut. Dilihat dari perkembangan realisasi, program KUM – meskipun termasuk dalam program dengan angka realisasi tinggi, namun jumlahnya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2005. Sebaliknya program Kredit Individu dan Program Paronisasi Sapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni mencapai 200% atau lebih.

Perkembangan positif yang terjadi pada kedua program ini mengindikasikan keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan bisnis klien pada program KUM yang kemudian memampukan mereka untuk melanjutkan pinjaman pada skala modal yang lebih besar yakni pada Program Kredit Individu. Sementara itu, peningkatan realisasi program sapi memberikan sinyal bahwa program ini akan menjadi salah satu program LKM andalan pada usaha produktif TLM di masa-masa mendatang.

Penutup

Berdasarkan uraian dan bahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Layanan LKM merupakan salah satu strategi kunci dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.
- Pengelolaan program LKM harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terfokus kepada realisasi kredit (mikro kredit) saja tetapi juga mencakup kebutuhan ekonomi lain seperti tabungan dan asuransi, yang didukung dengan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat.
- Program LKM akan memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi pengentasan masyarakat miskin apabila disain dan pengelolaannya disesuaikan dengan pola kehidupan golongan miskin yang kegiatan ekonominya (produksi, konsumsi, tabungan, pinjaman dan kegiatan mencari nafkah) dilakukan dalam skala kecil, dan mempunyai tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap gejolak ekonomi.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik. 2005. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. Biro Pusat Statistik: Kupang, Indonesia
- Matin, I., Hulme, D., and Rutherford, S. 1999. Financial Services for the Poor and Poorest. Deepening Understanding to Improve Provision. University of Manchester: Manchester, UK.
- Robinson, M.S. 2002. The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia. The World Bank and Open Society Institute: Washington, D.C.
- Seibel, H.D., and Parhusip, U. 1997. Microfinance in Indonesia: An Assessment of Microfinance Institutions Banking with the Poor. Development Research Center, University of Cologne, Cologne.
- Usman, S., Suharyo, W.I., Soelaksono, B., Toyamah, N., Mawardi, M.S., and Akhmadi. 2004. Micro Finance for Poor Communities: Experience of East Nusa Tenggara. SMERU: Kupang.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Klien Aktif (orang) yang terlibat dalam Program LKM TLM, 2002 – 2005

No	Program LKM	2002	2003	2004	2005
1.	KUM	5.385	7.250	11.605	11.425
2.	Individu	-	-	1.775	3.539
3.	Sapi	28	146	720	1.254
4.	Rumput laut	-	55	623	631
TOTAL		5.413	7.451	14.723	16.849

Keterangan: (-) Program belum dilaksanakan pada tahun bersangkutan

Tabel 2. Populasi Ternak Besar (ekor) Per Kabupaten/Kota Se Propinsi NTT, 2004

No	Kabupaten / Kota	Sapi	Kerbau	Kuda
1.	Sumba Barat	6.234	32.759	16.852
2.	Sumba Timur	40.325	33.603	27.577
3.	Kab. Kupang	133.920	7.051	11.762
4.	Timor Tengah Selatan	116.169	515	4.706
5.	Timor Tengah Utara	57.003	706	2.278
6.	Belu	92.586	2.513	3.730
7.	Alor	1.243	-	143
8.	Lembata	1.381	5	1.511
9.	Flores Timur	1.528	33	2.471
10.	Sikka	4.711	495	3.185
11.	Ende	6.517	2.515	2.547
12.	Ngada	33.505	11.923	8.097

13.	Manggarai	8.076	15.001	6.058
14.	Rote Ndao	14.191	10.084	4.290
15.	Manggarai Barat	2.149	19.742	1.160
16.	Kota Kupang	3.301	33	49
Total Propinsi NTT		522.929	136.968	96.416

Tabel 3. Realisasi Keuangan (dalam Rupiah) Program SPUP TLM, 2002 – 2005

No	Program	2002	2003	2004	2005
Saldo Piutang					
1.	KUM	1.712.793.375	1.653.619.272	2.689.871.984	2.601.879.288
2.	Individu	-	-	2.712.248.025	4.656.543.348
3.	Sapi	44.238.500	145.920.531	1.229.735.868	2.310.638.233
4.	Rumput Laut	-	-	2.712.248.025	4.656.543.348
T O T A L		1.757.031.875	1.818.564.334	6.871.618.235	9.837.134.371
Realisasi Kredit					
1.	KUM	4.783.440.650	8.062.788.600	12.237.500.290	5.941.848.155
2.	Individu	42.950.000	229.950.000	1.844.683.499	6.9990.675.242
3.	Sapi	-	19.766.250	395.835.000	2.310.638.233
4.	Rumput Laut	-	-	3.922.585.000	455.500.000
T O T A L		5.927.450.000	8.311.504.850	18.440.603.789	21.500.254.477

Keterangan: (-) Program belum dilaksanakan pada tahun bersangkutan

Daftar Peserta

Nama	Lembaga	Alamat	Nomor Telpon	Nomor Faks	Alamat Email
A. Tanggu Rame	Biro PP	Kupang			
A Umbu Sorung (Ir)	BAPPEDA Propinsi NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380833462		
Adrienne Francis	ABC, Radio	1 Cavenagh St Darwin NT 0800, Australia	+61 (0)417 208793		Francis.adrienne@abc.net.au
Adrinus Dengi	BPMD Propinsi	Kupang			
Agna Sulis Krave (Dr)	Dean Faculty of Biology, Unkris Satya Wacana	Jl Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia	+62 (0) 298321212	+62 (0) 62298321433	agnakrave@uksw.edu
Agus Rawambaku	BAPPEDA East Sumba, ACIAR Project	Jl Merpati No 2, Waingapu, Sumba Timur, NTT Indonesia	+62 (0)338 741 695		Agusreyner@yahoo.com
Alfred Zakarias (Ir.)	BAPPEDA Kab. Rote	Baa – Rote Ndoa			
Alipio Almeida (Dr)	Livestock, Univ Timor Lorosae				
Ancelmu Rica Dasilva	Taroman Partnership	Covalima, Timor Leste			
Andi L. Moekoe, SP	Agriculture Dep. Kab. Sumba Timur				
Ani Adi Winata Nawir	Socioeconomist-Plantation Programme. CIFOR	PO Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia	+62 (0) 251 622622	+62 (0)251 622100	A.Nawir@cgiar.org
Benediktus Polo Maing (Ir)	Dinas Kehutanan Kab. Ngada				
Brent Williams	Acting Director Natural Resources Management. Department of Natural Resources, Environment and the Art	PO Box 496 Palmerston, NT Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)8 8999 4568	+61 (0)8 8999 4403	Brent.Williams@nt.gov.au
Bronwyn Myers (Dr)	School of Science and Primary Industries	Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)8 8946 6726	+61 (0)8 8946 7088	Bronwyn.Myers@cdu.edu.au
Bungaran Saragih (Prof)	Agriculture led Rural Development NTT	Danau Bogor Raya G2 No:5, Bogor, Indonesia			
Carole Kayrooz (Prof)	University of Canberra	Canberra 2601 ACT Australia	+61 2 6201 5064		Carole.Kayrooz@canberra.edu.au
Christian E. Hunga	BAPPEDA Sumba Timur	Jl Merpati No 2, Waingapu, Sumba Timur, NTT Indonesia	+62 (0)811381083		
Dani Wetentera	Oxfam TTS (NGO)				
Daniel Murdiyarso	CIFOR	PO Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia			
Danny Suhadi (Ir)	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380833462		
Dharma Palekahelu	Faculty of Information Technology, Unkris Satya Wacana	Jl Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia	62298321212	62298321433	dpalekahelu@yahoo.com
Domy Pandjukang, SE	Bappeda Kabupaten Sumba Timur	Jl Merpati No 2, Waingapu			

Donata De Araujo	Agronomy, Univ Timor Lorosae				
Eddy Ismail MM, (Ir)	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380833462		
Efraim Muga	BAPPEDA Kab Ngada	Bajawa	+62 (0)34 21779		
Ergilio F Viante	Taroman Partnership	Suai			
Erlinda Boba Ruba	BAPPEDA Ngada, Flores	Bajawa	+62 (0) 81 339 449667		
Erna Hartati	UNDANA	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT	+62 (0)380826028		
Eufrasi Barros (Dra)	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380824980		
F. Robert Diogo	BAPPEDA Kab. Sikka	Maumere			
Fay Rola Rubzen (Dr)	Curtin University,WA	Muresk Institute, Northam WA 6401	+61 (0)8 – 9690 1561		F.Rola_Rubzen@curtin.edu.au
Ferry F. Karwur (Ir)	Center for Eastern Indonesia – Satya wacana Christian University	Jl Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia	+62(0)298321212	+62(0)298321433	fkarwur@yahoo.com
Frans Humbu Data, Prof	UNDANA	Jl. Adi Sucipto – Penfui Kupang NTT	+62(0)380 881580	+62(0)380 881674	alfredoud@yahoo.com
Frans Manafe	BAPPEDA Kab. Belu	Atambua			
Frans Salesman, M.Kes (Dr)	BAPPEDA Manggarai	Ruteng			
Frans Seda (Drs)	NT Representative in Indonesia	Wisma Penta 5th Floor, Jl Kebon Sirih 65, Jakarta Pusat 10340	+62 (0)21 315 2941	+62 (0)21 315 2942	floresfs@biz.net.id
Fransiska Rengo	Proyek ACIAR Kebakaran Ngada, Flores	Jl. MDI Panjaitan RTIII/RWHobo II Kelurahan Trikora Bajawa, Flores, NTT	+62 (0)81 339 452 671		
Fransiska Woro Y	Carita Australia	Dili, Timor Leste	+67 0726138		
Fred Benu	Lemlit UNDANA	Kupang	+62 (0)8123790246		Lemlit-undana@telkom.net
Fred Mone	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 380824980		
Gabriele Ndun	Dinas Perikanan	Kupang	+62 (0)81339465532		
Gede Witdarma (Ir)	Agriculture Dep. Kab. TTS				
Gegi Umbu Sawola	East Sumba		+62 (0)81 339 433 610		
Gil Conceicao (Ir)	Univ Timor Lorosae				
Greg Hill (Prof)	Deputy Vice-Chancellor University of Sunshine Coast	University of Sunshine Coast Maroochydore DC. QLD 4555	+61 (0)7 5459 4465	+61 (0)7 5459 4467	Ghill@usc.edu.au
Gregorisu Timo	Kab TTU	Kefemananu			
Guy Boggs (Dr)	School of Science & Primary Industry CDU	Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)8 89467138		guy.boggs@cdu.edu.au
Harry	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380824980		
Hendrikus Ataupah (Dr)	UNDANA	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT	+62 (0)38081947		

Herbert Siagian (Dr)	Depdagri	Jakarta			
Herman Banoet	Dinas Pariwisata NTT	Kupang	+62 (0)380826384		
Hilarius Sutanto (Drs)	Bappeda Kab. Ngada	Jl Ade Suryani Bajawa Ngada	+62 (0)38421035		
Hyan Ora	Department of Forest Resources Management, NTT	Jl Untung Suropati, Kupang	+62 (0)380829329		hyan_ora@yahoo.com
I. Made Sumidiarta	Dinas Kesehatan NTT	Kupang			
Ignas Jani, S Sos	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380824980		
J P Radja Pono	UNDP	Kupang			
Jacob Nulik (Dr)	Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian		+62 (0)380 833 766		
Jack Oematan, M.Si (Ir)	Politani	Kupang	+62 (0)339428344		
James Adam (Dr)	Univ Kris Artha Wacana	Jl Adi Sucipto, PO Box 147 Kupang	+62 (0)8123618477		
James Roshetko (Dr)	ICRAF	PO Box 161 Bogor 16001 Indonesia	+62 (0)251625415		j.roshekto@cgiar.org
Jakobus Taek Msi	BAPPEDA TTU	Kefamenano			
Jenny Carter (Dr)	University Sunshine Coast, Sustainable Community Development	Maroochydore, Qld, Australia	+61 (0)7 5459 4496		jcarter@usc.edu.au
Jeremy Russell-Smith (Dr)	Bushfires Council NT and CRC Tropical Savannas Management	PO Box 37346 Winnellie NT 0821 Australia	+61 (0)8 8922 0844	+61 (0)8 8922 0833	Jeremy.Russell-Smith@nt.gov.au
Jerry Vanclay	Southern Cross University	PO Box 157, Lismore, NSW 2480 Australia			
Johanna Karam	Oxfam Australia, Timor Leste	Oecusse District, Timor Leste	+67 (0)7230833		Oxfam.oekussi@oxfam.org.tp
Johanna Mone	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380824980		johannakaram@yahoo.com..au
John Landuwulang	Dinas Kehutanan	Waingapu	+62 (0)81339286539		
John Maxwell	ANU	The Australian National University, Canberra ACT 0200, Australia			john.maxwell@anu.edu.au
John Mella, (Drs) M.Si	Forestry Dep. Kab. TTS	Gedung Manggala Wanabakti, Jl Jend Gatutu Subroto Soe TTS			
John Subani	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380823980		
Johnny Umbu R. Anabuni, ST	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)8124637606		
Josef Maan	Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) Ngada, Flores	Jl. MDI Panjaitan RTIII/RWHobo II Kelurahan Trikora Bajawa, Flores, NTT	+62(0) 81339481413		ytm-ngada@dps.centrin.net.id

Josis Jawa Gigi	Dinas Pertanian Sumtim	Waingapu			
Juspan (Ir)	Dinas Kehutanan	Waingapu	+62 (0)81339449423		
Delfin Gusmaoa	Oxfam Australia, Timor Leste	Covalima District, Timor Leste			
Justinus Depa	ACIAR Proyek Kebakaran, Ngada	Bajawa, Flores, NTT	+62 (0)813 3837915		ytm-ngada@dps.centrin.net.id
K. Masneno	Dinas Koperasi NTT	Kupang	+62 (0)812379658		
Lourenco Borges Fontes	Director of Research and Extension Services, East Timor		0011 670 333 9033 or 723 6223		risonlia@yahoo.com
Luis Fernandes	Oxfam Australia, Timor Leste	Oecusse District, timor Leste	+67 07273758		
Ludo Carbavo	Care	Kupang	+62 (0)380823577		
M. Litik, M.Si	Dinas Peternakan	Kupang	+62 (0)380833386		
M. Ndolu Eoh	Perindag	Kupang			
M. Katipana Prof.Dr	Badan Pertanahan Negara, UNDANA	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT	+62 (0)380881327		
M.M.J. Kappa	UNDANA	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT	+62 (0)380881082		
Manase Malo (Dr)	UI Jakarta	Jakarta	+62 (0)816882493		
Marcellino Belo	Oxfam Australia, Timor Leste	c/- Oxfam Australia, Dili, Timor Leste			marcelinob@oxfam.org.au
Maria Lobo	UNDANA	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT			
Maria S Awa	Kab Ngada	Bajawa	+62 (0)384 21779		
Marie Ann Merza	VSO Ngada	Bajawa	+62 (00384 21779		
Marlin Rambu K Yowi	Politani	Kupang			
Martha Ratoe Oedjoe, SH	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)81339493321		
Marthen Mullik (Dr)	Universitas Nusa Cendana	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT	+62 380 881 448		martin_kpq@yahoo.com.au
Martinus Ndale SH	BAPPEDA Kab Ende	Ende			
Matt Darcy	Dir Crops, Forestry and Horticulture. NT Department Primary Industries, Fisheries and Mines	Berrimah Research Farm	+61 (0)8999 2222	+61 (0)8999 2049	matt.darcey@nt.gov.au
Michael Blyth (Dr)	Four Scenes Pty Ltd.	PO Box 50 Kippax, Canberra,ACT Australia	+62 (0)419 818410		Micael.blyth@fourszenes.com.au
Mien Ratoe Oejoe (Dr)	UNDANA	FKIP, Jl Soegarto 72, Kupang	+62 (0)380 822515		ppwundana@yahoo.com
Moses de Rosario	Oxfam Australia, Timor Leste Oecusse	Oecussi District, Timor Leste	+67 (0)7281415		
Natasha Stacey (Dr)	School for Environmental Research, Charles Darwin University	Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)89466268		natasha.stacey@cdu.edu.au
Nicky Uly (Ir)	BAPPEDA Kota Kupang	Kupang	+62 (0)81339339653		
Nilda Maniquim	Oxfam Australia, Timor Leste	Oecussi District, Timor Leste	+67 (0)7280985		

Obaldus Toda	BAPPEDA Propinsi NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380833462		
Okky Laisnima	Yayasan Pancaran Kasih (NGO)	Soe			
Oni Lawata (Ir)	Plan Indonesia TTS (NGO)	Soe			
Onismus Ndun, M Si (Ir)	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)81339252555		
P. S. Siahaan	BPS	Kupang			
Pam Minnigh (Ir)	GTZ ProAir	Jl. Soeharto 11, Waingapu 87112, Kotak Pos 177, Sumba Timur NTT	+62 (0)811381287		minnigh@proair.or.id
Paskalis Lalu, SH	Yayasan Konservasi Biologi (SERBIO) Kab.Ngada				
Paskalis Nai	KPMNT	Kupang	+62 (0)81339446611		
Paul Mella (Ir)	Dinas Peternakan	Soe	+62 (0)38822271		
Penny Wurm (Dr)	Tropical Savannas Cooperative Research Centre (CRC)	Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)8946 6355	+61 (0)8946 7107	Penny.Wurm@cdu.edu.au
Peter Jacklyn (Dr)	Coordination/Communication Dept.Tropical Sannavas CRC	Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)8 8946 6285	+61 (0)8946 7107	peter.jacklyn@cdu.edu.au
Piet Alexander Talo	Governor of NTT	Kantor Gubernur NTT. Jl Raya Eltari	+62 (0)380 833111	+62 (0)380 826398	
Petrus B. Klau	BAPEDALDA	Kupang	+62 (0)81339421438		
Petrus Pandanga	ACIAR Fire Project, Sumba	Waingapu	+62 (0)81325221826		
Pieter Muga	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Kupang			
RLK Repati Nugroho	STIE Krisnawina	Waingapu			
Rabela Tati Punef	Oxfam Australia, Timor Leste	Oecussi District, Timor Leste	+67 (0)7288098		
Rafael Arhat, M.Si (Drs)	BAPPEDA Manggarai Barat	Labuan Bajo			
Rambu Raing	KOPPESDA	Waingapu	+62(0)81339452671		
Rambu Shinta, S.Hut	Forestry Dep. Kab. Sumba Timur	Waingapu			
Regina Maanari (Dra)	Biro Keuangan	Kupang			
Robert Gana (Ir)	Dinas Peternakan Sumtim	Waingapu	+62 (0)81339451188		
Robert (Bob) Wasson, (Prof)	Deputy Vice Chancellor, DVC Research Office,CDU	Charles Darwin University, Darwin 0909 NT	+61 (0)8 8946 6868		robert.wasson@cdu.edu.au
Rohan Fisher	Charles Darwin University Darwin 0909 NT	PO Box 828, Nightcliff	+61(08) 8985 6143		cycadmedia@bigpond.com

Rozali	Yayasan TLM	Kupang	+62 (0)380823613		ytlm@kupang.wasantara.net.id
Russell Haines (Dr)	Program Manager, Forestry, ACIAR	GPO Box 1571 Canberra ACT 2601	+61 (0)2 62170500	+61 (0)2 6217 0501	HAINES@ACIAR.gov.au
Sabino F Pinto	Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry, Timor Leste	Oecusse District, Timor Leste	+6707273758		
Siliwoloe Djoeroemana (Dr)	STIE Krisnawina	Waingapu	+62 (0)81246029246		
Simon Bolla	SETDA Ngada	Ngada	+62 (0)384 21074		
Simon Radjapono, SH,M.Si	Bappeda Kab.TTS	Kantor BAPPEDA TTS, Jl. Gunung Mollo No. 47, Soe	+62(0)388 21118	+62(0)388 22862	
Sipri Wuru (Ir)	Yayasan Bahana mandiri (NGO)				
Sorang B Yohanes	PPW UNDANA	Jl. Adi Sucipto - Penfui, Kupang, NTT	+62 (0)339430854		
Sunarto (Drs)	Faculty of Biology – Satya Wacana Christian University	Jl Diponegoro 52-60, Salatiga, Indonesia			
Stefanus Makambombu	GTZ Promis	Jl. Soeharto 11, Waingapu 87112, Kotak Pos 177, Sumba Timur NTT, Indonesia	+62 (0)24608994		
Stephen Garnett (Prof)	Charles Darwin University	Darwin 0909 NT, Australia	+61 (0)88946 7115		Stephen.garnett@cdu.edu.au
Teofila Maia	Oxfam Australia, Timor Leste	Covalima District, Timor Leste			
Th.L. Salean, M Si	Head of BAPPEDA. Propinsi NTT	Jl Polisi Militer 2. Kupang NTT	+62 (0)380 824980	+62 (0)380 833462	
Tien Riwu de Quelijoe	Yayasan Alfa Omega	Kupang	+62 (0)380832613		
Tobias Ully, MSi (Ir)	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 (0)380833462		
Tony Benu	Care	Atambua	+62 384 21779		
Tony Cunningham	Charles Darwin University	Darwin 0909 NT Australia			tonyc05@bigpond.net.au
Ujjwal Pradhan	Program Officer, Asset Building and Community Development. Ford Foundation	PO Box 2030 Jakarta 10020, Indonesia	+62 (0)21 252 4073	+62 (0)21 252 4078	ffjakarta@fordfound.org
Urbanus Ola	Unika Widta Mandira	Kupang	+62 (0)8123799681		
W Nope	Badan Pemberdayaan Manusia				
T O Buling	BAPPEDA Kab Alor	Kalabahi	+62 (0)812 46613998		
Yohana Kune (Ir)	Agriculture Dep. Kab.Ngada				
Yos Diaz	Biro Ekonomi	Kupang	+62 (0)813107158		
Yudhistira G. Yewangoe, M Com	BAPPEDA NTT	Jalan Polisi Militer No 2, Kupang, NTT, Indonesia	+62 81339419667		Gresko0106@yahoo.com